



# **LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA**

*Tema :*

**“OPTIMALISASI PEMBAHASAN LKPJ KEPALA DAERAH DALAM RANGKA  
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL ”**

**Tanggal, 04 s.d 07 Februari 2026  
Hotel “Grand Karlita” Purwokerto - Banyumas**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)  
UNIVERSITAS AKI  
SEMARANG  
2026**



# **LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA**

*Tema :*

**“Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel”**

**Tanggal, 04 s.d 07 Februari 2026  
Hotel “Grand Karlita” Purwokerto - Banyumas**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)**

**UNIVERSITAS AKI  
SEMARANG  
2026**

# Kata Pengantar

---

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat dan Tuntunan-Nya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI telah menyelesaikan penyusunan laporan kegiatan Bimbingan Teknis **“Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel”**, yang diharapkan dapat memberikan data dan informasi bagi pihak - pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis yang akan datang.

Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kualitas Anggota DPRD serta perangkat pendukungnya dalam melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah secara komprehensif, objektif, dan berbasis regulasi, sehingga hasil pembahasan LKPJ dapat menjadi instrumen pengawasan yang efektif dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga upaya, jerih payah dan pengabdian yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

Terima kasih juga kami ucapkan kepada Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa tengah yang telah telah memandu dan mengarahkan kami agar dapat melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis secara berkualitas, optimal dan sesuai dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Purbalingga yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis. Masukan, saran, serta kritik konstruktif sangat dibutuhkan dalam perbaikan untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis di kemudian hari semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai wakil rakyat.

Semarang, Februari 2026  
Kepala LPPM,

The logo consists of the text 'Unak' in a large, bold, blue font, with 'LPPM' in a smaller, blue font below it. A stylized signature in black ink is written over the logo.

**Ana Wahyuni, S.Si., M.Kom.**  
NIDN. 0601067503

# Daftar Isi

---

	Hal
Kata Pengantar -----	I
Daftar Isi -----	II
<b>BAB I PENDAHULUAN -----</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang -----	1
B. Maksud dan Tujuan -----	3
C. Dasar Hukum -----	4
<b>BAB II RENCANA KEGIATAN-----</b>	<b>6</b>
A. Organisasi Penyelenggara -----	6
B. Waktu dan Tempat -----	6
C. Tema dan Materi -----	6
D. Narasumber -----	7
E. Metode dan Teknik Pembelajaran -----	7
F. Pembiayaan -----	7
G. Sertifikat -----	8
<b>BAB III REALISASI KEGIATAN -----</b>	<b>9</b>
A. Susunan Acara Pembukaan -----	9
B. Susunan Acara Penutupan -----	10
C. Peserta -----	10
D. Tindak Lanjut -----	10
E. Sarana dan Prasarana -----	11

---

---

BAB IV	EVALUASI KEGIATAN	-----	12
BAB V	PENUTUP	-----	20
Lampiran – lampiran			

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah adalah laporan yang disampaikan oleh kepala daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) kepada DPRD mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan instrumen penting dalam mekanisme checks and balances antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Pembahasan LKPJ oleh DPRD tidak hanya bersifat administratif, tetapi strategis dalam memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kompleksitas dokumen, dinamika regulasi, serta tuntutan publik terhadap keterbukaan informasi menuntut peningkatan kapasitas Anggota DPRD dan perangkat pendukung dalam melakukan pembahasan LKPJ secara komprehensif dan berbasis data.

Pembahasan LKPJ oleh DPRD diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang konstruktif, terukur, dan dapat ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman regulasi, lemahnya analisis kinerja, serta belum optimalnya perumusan rekomendasi DPRD.

Optimalisasi Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. LKPJ merupakan instrumen konstitusional yang mencerminkan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, pembahasan LKPJ oleh DPRD tidak hanya bersifat administratif atau formalitas, tetapi harus menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah daerah secara komprehensif, objektif, dan berbasis data. Pembahasan yang optimal memungkinkan DPRD menilai kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program/kegiatan, serta capaian kinerja pembangunan daerah, termasuk efektivitas penggunaan anggaran dan kualitas pelayanan publik.

Namun demikian, masih ditemui berbagai tantangan dalam pembahasan LKPJ, seperti keterbatasan pemahaman substansi LKPJ, kurang optimalnya analisis terhadap indikator kinerja, serta belum maksimalnya pemanfaatan hasil pembahasan LKPJ sebagai bahan perbaikan kebijakan dan rekomendasi strategis. Kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi pengawasan DPRD dan mengurangi dampak LKPJ dalam mendorong perbaikan kinerja pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi pembahasan LKPJ Kepala Daerah melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman anggota DPRD terhadap regulasi, metodologi evaluasi kinerja, serta teknik penyusunan rekomendasi yang konstruktif dan aplikatif. Pembahasan LKPJ yang berkualitas diharapkan mampu

memperkuat fungsi pengawasan DPRD, mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan akuntabilitas kepala daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dengan optimalisasi pembahasan LKPJ, DPRD dapat berperan lebih efektif dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas Anggota DPRD dalam melaksanakan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah secara komprehensif, objektif, dan berbasis regulasi, sehingga DPRD mampu menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara optimal.
2. Meningkatkan pemahaman regulasi terkait LKPJ Kepala Daerah, termasuk landasan hukum, mekanisme, dan tahapan pembahasan LKPJ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memperkuat kemampuan analisis DPRD dalam menilai kinerja kepala daerah berdasarkan capaian program, kegiatan, dan indikator pembangunan daerah.

4. Mengoptimalkan peran DPRD dalam memberikan rekomendasi strategis, konstruktif, dan implementatif atas LKPJ Kepala Daerah.
5. Menyamakan persepsi dan standar pembahasan LKPJ di lingkungan DPRD agar proses evaluasi berjalan sistematis, terukur, dan berorientasi pada perbaikan kinerja pemerintahan daerah.
6. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

### **C. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang melandasi kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah sebagai berikut:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Surat Ijin Nomor 895.3/6164/BPSDM Tahun 2020 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

## **BAB II RENCANA KEGIATAN**

### **A. Organisasi Penyelenggara**

Nama organisasi penyelenggara adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang.

### **B. Waktu dan Tempat**

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis dilaksanakan selama 4 (empat) hari, terhitung mulai tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, di Hotel "Grand Karlita" Jl. S. Parman No. 296, Purwokerto - Banyumas 53141.

### **C. Tema dan Materi**

Tema Bimbingan Teknis "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**"

**Materi :**

1. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
2. Strategi Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah yang Efektif dan Tepat Sasaran
3. Character Building : Menjadi Anggota DPRD yang Profesional, Berintegritas dan Berjiwa Kepemimpinan
4. Focus Group Discussion (FGD)

## **D. Narasumber**

Narasumber Bimbingan Teknis ini adalah sebagai berikut :

1. Vivin Gunawan, S.STP., MA., Ak., CA (Analisis Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri)
2. Eko Suseno Hendro Riyadi Matruty, S.E., M.M., PFC. (SMARTSIA Training & Consultan)

## **E. Metode dan Teknik Pembelajaran**

Metode dan teknik pembelajaran yang digunakan dalam Bimbingan Teknis ini adalah :

1. Ceramah ; penyampaian materi oleh narasumber secara terstruktur sesuai dengan topik yang disampaikan
2. Diskusi dan Tanya Jawab ; peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber sehingga penyajian menjadi dinamis, menarik dan interaktif sehingga tidak membosankan.

## **F. Pembiayaan**

Biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis ini bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2026, dengan nominal setiap peserta adalah sebesar @ Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

## **G. Sertifikat**

Peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan baik akan memperoleh Sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas AKI dengan nomor registrasi Sertifikat dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang mana sertifikat yang dimaksud pada halaman depan bertandatangan Rektor Universitas AKI dan halaman belakang bertandatangan Kepala LPPM Universitas AKI.

## **BAB III**

### **REALISASI KEGIATAN**

#### **A. Susunan Acara Pembukaan**

Kegiatan Bimbingan Teknis “Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel” dibuka pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2026 dan diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga sebanyak 49 orang.

Adapun rangkaian acara pembukaan adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Mengheningkan Cipta
4. Sambutan sekaligus pembukaan

Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Bapak H.R. Bambang Irawan, S.H., S.Sos.,  
M.M.

5. Pembukaan Acara Bimbingan Teknis Secara Simbolis
6. Pembacaan Do'a
7. Foto Bersama

## **B. Susunan Acara Penutupan**

Kegiatan Bimbingan Teknis “Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel” ditutup pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2026, dengan rangkaian susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Sambutan sekaligus penutupan  
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Bapak Aris Widiarso, S.H.
3. Penutupan Acara Bimbingan Teknis Secara Simbolis
4. Foto Bersama
5. Penutup

## **C. Peserta**

Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga. (Daftar hadir terlampir).

## **D. Tindak Lanjut**

Setelah menyelesaikan kegiatan Bimbingan Teknis, para peserta dibekali oleh seluruh makalah dan materi yang telah disampaikan. Materi yang disampaikan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan rencana tindak lanjut (action plan). Rencana tindak lanjut tersebut berupa mentransfer pengetahuan yang diperoleh selama Bimbingan Teknis kepada seluruh peserta yang terkait.

## **E. Sarana dan Prasarana**

Kegiatan Bimbingan Teknis diselenggarakan di Hotel Grand Karlita Purwokerto, dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

### **1. Akomodasi**

Akomodasi peserta berupa tempat penginapan dengan hotel berbintang yang nyaman bagi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan konsumsi yang baik bagi peserta.

### **2. Media Pembelajaran**

Media pembelajaran yang digunakan adalah laptop, LCD *projector*, *sound system*, *Flip Chart*, alat tulis untuk peserta, dan fotocopy materi bahan ajar.

### **3. Seminar Kit**

Peserta Bimbingan Teknis mendapatkan fasilitas Seminar Kit.

## BAB IV HASIL EVALUASI



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263, Telepon 7473066, Faksimile . 7473701  
Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> Surat Elektronik : [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

Semarang, 9 Februari 2026

Nomor : B/800.2.4.6/127/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1(satu) Dokumen  
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan  
Pendalaman Tugas Anggota DPRD  
Kabupaten Purbalingga Tahun 2026

**Yth. Ketua LPPM Universitas Abadi Karya Indonesia (AKI)**  
Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu  $\geq 3,5$  dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan oleh LPPM Universitas Abadi Karya Indonesia (AKI) Semarang di Hotel Grand Karlita Purwokerto, mulai tanggal 5 sampai dengan 7 Pebruari 2026, dari pagi, siang hingga sore hari mulai pukul 08.00 s/d 17.15 WIB
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Purbalingga , dalam kategori **Memuaskan**, dan **dibawah target capaian sasaran mutu**, dengan rincian sebagai berikut:

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	88,78	Memuaskan	3,55	DACM
2	Layanan Administrasi	83,16	Memuaskan	3,33	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	83,67	Memuaskan	3,35	DBCM
<b>Rata-rata.....</b>		85,20	Memuaskan	3,41	DBCM

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, berjalan dengan tertib dan lancar.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah,



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197607302001122003

**Tembusan:**

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas Abadi Karya Indonesia (AKI) Semarang



# 2026

## **EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURBALINGGA**

Periode 5 s.d. 7 Pebruari 2026

**BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH**



## **A. LATAR BELAKANG**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai mandatori dari Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten / Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

## **B. DASAR HUKUM**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

## **C. TUJUAN**

Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :

- 1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;
- 2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
- 3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

## **D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA**

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur :

### **1. Capaian Nilai**

Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah sebagai berikut :

$$\left( \frac{SR}{JR} \times 100 \right) + \left( \frac{R}{JR} \times 75 \right) + \left( \frac{KR}{JR} \times 50 \right) + \left( \frac{TR}{JR} \times 25 \right)$$

- Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban
  - 1) Kurang
  - 2) Cukup
  - 3) Baik
  - 4) Sangat Baik
- Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria

0 - 60.00	Tidak Memuaskan
60.01 - 70.00	Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00	Cukup Memuaskan
80.01 - 90.00	Memuaskan
90.01 - 100.00	Sangat Memuaskan

## 2. Capaian Mutu

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target Capaian Mutu sebesar  $\geq 3,50$  dari skala 4,0.

0 s.d. 3,49	Di Bawah Capaian Mutu (DBCM)
3,50 s.d. 4,00	Di Atas Capaian Mutu (DACM)

## 3. Persepsi Negatif / Positif

**Persepsi Negatif** = Respon Tidak + Respon Kurang / 2 \* 100%

**Persepsi Positif** = Respon Sangat + Respon Cukup / 2 \* 100%

Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu tidak lebih dari 20%.

## E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan	: Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga
Periode	: 5 s.d. 7 Pebruari 2026
Jumlah Peserta	: 49 orang
Jumlah Responden	: 49 orang
Tanggal Evaluasi	: 6 Pebruari 2026

## F. HASIL EVALUASI

Sebagaimana terlampir.

## G. KESIMPULAN

### 1. Evaluasi Penyelenggaraan

Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Memuaskan, yang ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 85.20 dengan Capaian Mutu (CM) berada pada indeks 3.41 yang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM).

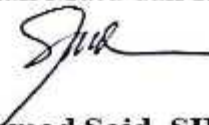
### 2. Saran

Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari peserta, perlu perbaikan pada aspek-aspek diantaranya :

- (a) Program disesuaikan dengan kebutuhan pembahasan
- (b) Materi motivasi sebaiknya lebih variatif
- (c) Lampu ruangan kurang terang

Mengetahui,

Sub Koordinator  
Pengendalian Mutu dan Kerjasama



**Mochamad Said, SH, MH**

Pembina

NIP. 196712031987031003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**BADAN PENGEMBANGAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263  
 Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdm.jatengprov.go.id>  
 Surat Elektronik [bpsdm@jatengprov.go.id](mailto:bpsdm@jatengprov.go.id)

**REKAPITULASI PER ANGKATAN**

**EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2026**

TANGGAL EVALUASI

06/02/2026

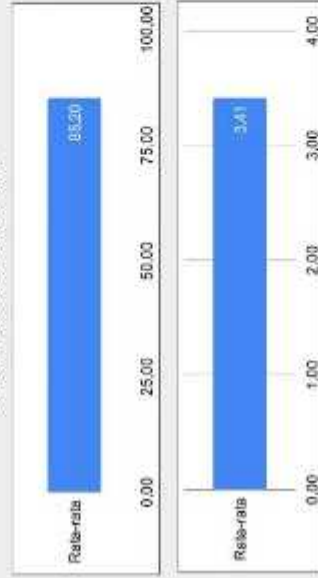
ANGKATAN DAN ASAL PESERTA

UNAKI Bimtek Dewan Kabupaten Purbalingga

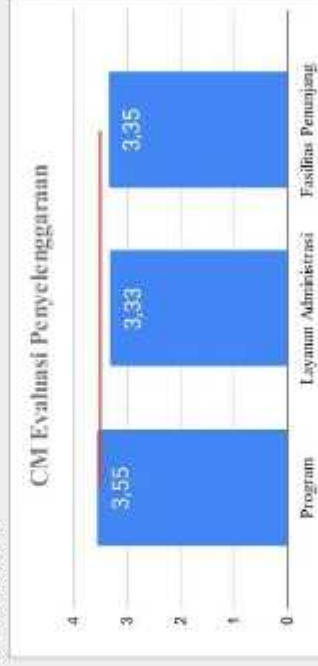
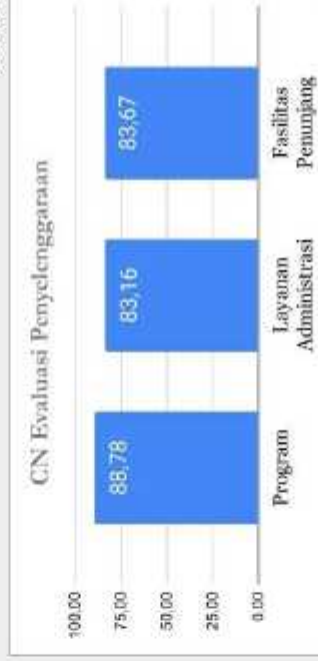
LOKASI PELAKSANAAN

Hotel Grand Karlita Purwokerto

**RESUME KESELURUHAN**



**REKAPITULASI PER ASPEK**



Jumlah Responden
49

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	88,78	Memuaskan	3,55	DACM
2	Layanan Administrasi	83,16	Memuaskan	3,33	DBCm
3	Fasilitas Penunjang	83,67	Memuaskan	3,35	DBCm
	Rata-rata	85,20	Memuaskan	3,41	DBCm

Skala Penilaian sebagai berikut:

No	Rentang Skala	Kualifikasi
1	90,01 – 100	Sangat Memuaskan
2	80,01 – 90,0	Memuaskan
3	70,01 – 80,0	Cukup Memuaskan
4	60,01 – 70,0	Kurang Memuaskan
5	0,00 – 60,0	Tidak Memuaskan

Skala Mutu

Nilai	Kriteria
≥ 3,50	Di Atas Capaian Mutu
< 3,50	Di Bawah Capaian Mutu

REKAPITULASI DATA EVALUASI

NO	ASPEK	INDIKATOR	JR	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	CN	Kriteria	CM	Kriteria	Persepsi Positif	Persepsi Negatif
1	Program	1.1 Program diklat merupakan topik yang aktual	49	0	1	14	34	91,84	Sangat Memuaskan	3,67	DACM	97,96%	2,04%
		1.2 Relevansi materi dengan kebutuhan praktis peserta	49	0	1	21	27	88,27	Memuaskan	3,53	DACM	97,96%	2,04%
		1.3 Alokasi waktu yang diberikan bagi tiap materi	49	0	1	25	23	86,22	Memuaskan	3,45	DBCM	97,96%	2,04%
2	Layanan Administrasi	2.1 Sistem pemaugilan peserta	49	0	1	31	17	83,16	Memuaskan	3,33	DBCM	97,96%	2,04%
		2.2 Sistem registrasi peserta	49	0	1	30	18	83,67	Memuaskan	3,35	DBCM	97,96%	2,04%
		2.3 Pelayanan dan sikap petugas	49	0	1	32	16	82,65	Memuaskan	3,31	DBCM	97,96%	2,04%
3	Fasilitas Penunjang	3.1 Kualitas fasilitas ruang kelas (audio, proyektor, pendingin ruangan, screen, dll)	49	0	1	29	19	84,18	Memuaskan	3,37	DBCM	97,96%	2,04%
		3.2 Penyediaan kamar (kebersihan, fasilitas, kenyamanan)	49	0	1	30	18	83,67	Memuaskan	3,35	DBCM	97,96%	2,04%
		3.3 Penyediaan konsumsi (kebersihan, kecepatan penyajian, variasi menu)	49	0	1	30	18	83,67	Memuaskan	3,35	DBCM	97,96%	2,04%
		3.4 Penyediaan fasilitas lain (internet, tempat ibadah)	49	0	1	31	17	83,16	Memuaskan	3,33	DBCM	97,96%	2,04%

SARAN DAN MASUKAN DARI PESERTA

- 1 Program disesuaikan dengan kebutuhan pembalasan
- 2 Materi motivasi sebaiknya lebih variatif
- 3 Lampu ruangan kurang terang

Petugas Evaluator



MOCHAMAD SAID, SH, MH

## **BAB V PENUTUP**

Demikianlah keseluruhan rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis “Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel”. Semoga kegiatan tersebut bermanfaat bagi para Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang nantinya menjadi gerbong penggerak dinamika pemerintahan yang konstruktif. Melalui kegiatan ini, semoga peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya mampu mencapai keberhasilan serta mendapat apresiasi positif dari masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan dan keadilan.



# **SURAT PENAWARAN**

Nomor : 001/PT/LPPM-UNAKI/I/2026  
Lampiran : Proposal Kegiatan  
Perihal : **Penawaran Bimbingan Teknis**

Kepada Yth.  
**Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga**  
Provinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

Salam sejahtera kami ucapkan, Semoga Bapak/Ibu beserta keluarga selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan sukses dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan.

Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah hal mutlak yang harus senantiasa dilaksanakan. Begitu pula dengan berbagai regulasi yang menjadi acuan haruslah senantiasa disosialisasikan agar dipahami dan menjadi acuan dalam setiap tugas, peran, dan fungsi bagi setiap Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka bersama surat ini kami Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI berdasarkan surat ijin dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI No. 895.3/6164/BPSDM, Tanggal 02 Desember 2020 yang telah diperbaharui dengan surat ijin No. 895.3/7200/BPSDM, Tanggal 19 Agustus 2022 bermaksud menawarkan kerjasama Penyelenggaraan Pendalaman Tugas, Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan tema : **“Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel”**.

Adapun kegiatan akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu s.d Sabtu  
Tanggal : 04 – 07 Februari 2026  
Tempat : Hotel **“Grand Karlita”** Jl. S. Parman No. 296, Purwokerto - Banyumas 53141  
Kontribusi : 6.000.000,-/Peserta

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, dengan harapan dapat terjalin kerjasama yang baik dan bermanfaat. Kemudian atas perhatiannya dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Semarang, 19 Januari 2026  
Kepala LPPM,



**Ana Wahyuni, S.Si., M.Kom.**  
NIDN. 0601067503

Tembusan :  
1. Rektor Universitas AKI  
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga  
3. Arsip



# **JADWAL KEGIATAN**

## JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

Tanggal 04 s.d. 07 Februari 2026 | Hotel "Grand Karlita" Purwokerto

**Hari/Tanggal : Rabu, 04 Februari 2026**

Waktu	Materi/Kegiatan	Narasumber/Fasilitator
14.00 - 18.00	Chek - In & Registrasi Peserta	Panitia & Peserta
18.00 - 21.00	Makan Malam	Panitia & Peserta
21.00 -	Istirahat	Panitia & Peserta

**Hari/Tanggal : Kamis, 05 Februari 2026**

Waktu	Materi/Kegiatan	Narasumber/Fasilitator
06.00 - 09.00	Makan Pagi	Panitia & Peserta
09.00 - 09.30	<b>UPACARA PEMBUKAAN :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>- Sambutan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Sambutan Rektor Universitas AKI</li> <li>- Sambutan Ketua DPRD Kab. Purbalingga sekaligus Membuka Acara</li> <li>- Penutup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ibu Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd.</li> <li>▪ Ibu Prof. Dr. Tri Purwani, SE., MM.</li> <li>▪ Bp. H.R. Bambang Irawan, SH., S.Sos., MM.</li> </ul>
09.30 - 12.30	<b>Materi 1 :</b> Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah	<b><u>Bp. Vivin Gunawan, S.STP., MA., Ak., CA</u></b> (Analisis Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri)
12.30 - 14.00	Istirahat	Panitia & Peserta
14.00 - 17.30	<b>Materi 2 :</b> Strategi Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah yang Efektif dan Tepat Sasaran	<b><u>Bp. Vivin Gunawan, S.STP., MA., Ak., CA</u></b> (Analisis Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri)

**Hari/Tanggal : Jum'at, 06 Februari 2026**

Waktu	Materi/Kegiatan	Narasumber/Fasilitator
06.00 - 09.00	Makan Pagi	Panitia & Peserta
09.00 - 11.30	<b>Materi 3 :</b> Character Building : Menjadi Anggota DPRD yang Profesional, Berintegritas dan Berjiwa Kepemimpinan	<b><u>Bp. Eko Suseno Hendro Riyadi Matruty, S.E., M.M., PFC.</u></b> (SMARTSIA Training & Consultant)
11.30 - 14.00	Istirahat	Panitia & Peserta
14.00 - 17.30	<b>Materi 4 :</b> Focus Group Discussion (FGD)	Pimpinan DPRD Universitas AKI

Hari/Tanggal : Sabtu, 07 Februari 2026

Waktu	Materi/Kegiatan	Narasumber/Fasilitator
06.00 - 09.00	Makan Pagi	Panitia & Peserta
09.00 - 11.00	Perumusan Hasil Diskusi dan Evaluasi Kegiatan <b>PENUTUPAN</b>	Pimpinan DPRD Universitas AKI
11.00 - 12.00	Check Out	Panitia & Peserta



# **AKREDITASI UNIVERSITAS**



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 192/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024, menyatakan bahwa

**Universitas Aki, Kota Semarang**  
memenuhi syarat peringkat

**Akreditasi Baik Sekali**

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku  
sejak tanggal 20 - Maret - 2024 sampai dengan 20 Maret 2029



Jakarta, 5 - Maret - 2024

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif



# **SURAT PENUNJUKAN**



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Onje No. 2A ☎ ( 0281 ) 891058 Fax. ( 0281 ) 895052  
PURBALINGGA 53311

Purbalingga, 23 Januari 2026

Nomor : 175/135/2026  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyelenggaraan Bintek  
Bagi Pimpinan dan Anggota  
DPRD Kabupaten Purbalingga

Kepada Yth.  
Kepala LPPM Universitas AKI  
Semarang  
di-  
SEMARANG

Menindaklanjuti surat dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI Nomor : 001/PT/LPPM-UNAKI/II/2026 tanggal 19 Januari 2026 perihal Penawaran Bimbingan Teknis, maka bersama ini kami sampaikan bahwa setelah dipelajari dan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga, pada prinsipnya menyetujui dan akan mengirim 49 (empat puluh sembilan) orang dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan catatan sebagai berikut:

1. Waktu dan tempat penyelenggaraan adalah hari Rabu s.d. Sabtu tanggal 4 s.d.7 Februari 2026 di Hotel Grand Karlita Purwokerto.
2. Materi Bintek dengan tema "Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel".
3. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bintek berpedoman pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PURBALINGGA  
  
SEKRETARIAT  
DPRD  
**EDHY SURYONO, S.Sos, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630829 199001 1 002

Tembusan:

Yth. Bapak dan Ibu Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga



**SURAT  
PERJANJIAN  
KERJASAMA  
(MOU)**



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS AKI**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS**  
**BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**

Nomor Setwan : 560/134/I/2026  
Nomor Unaki : 021/SJ/REK/UNAKI/I/2026

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (23-01-2026), yang bertanda tangan dibawah ini :



- I. Nama : **EDHY SURYONO, S.Sos., M.M.**  
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga  
Alamat : Jl. Onje No. 2A Purbalingga 53311

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : **Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., M.M.**  
Jabatan : Rektor Universitas AKI  
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas AKI, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Halaman 1 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dengan ini menerangkan bahwa kami dari kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.



**Pasal 2**

**SYARAT PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat :

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berhubungan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

Halaman 2 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 3  
PESERTA**

Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Periode 2024 - 2029.

**Pasal 4  
PELAKSANA KEGIATAN**



Pelaksana kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026 adalah PIHAK KEDUA yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI.

**Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN**

Masing-masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain :
  - a. Menyiapkan peserta Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
  - b. Berhak menerima berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, hasil evaluasi dan pelaporan, serta sertifikat bagi peserta.
  - c. Menyerahkan biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga melalui transfer sebelum berlangsungnya kegiatan ke Rekening BANK MANDIRI No : 136 - 00 - 1194936 - 6, An. UNIVERSITAS AKI.
  - d. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
  - e. Berhak mendapatkan laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis dari PIHAK KEDUA.

Halaman 3 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :

- a. Berhak mendapatkan anggaran atau kontribusi keikutsertaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
- b. Berhak memperoleh data/informasi terkait Penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dari Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.
- c. Melakukan permohonan rekomendasi dan koordinasi surat menyurat pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.
- d. Menyediakan seluruh aspek pembelajaran, bahan ajar, pemateri atau narasumber/moderator/pendamping, akomodasi dan konsumsi serta seminar kit.
- e. Menerbitkan dan menandatangani sertifikat.
- f. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.

**Pasal 6**

**WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**



Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga pada hari Rabu s.d Sabtu tanggal 04 - 07 Februari 2026 di Hotel "Grand Karlita" Jl. S. Parman No. 296, Purwokerto - Banyumas 53141.

**Pasal 7**

**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga berlaku sejak ditandatangani sampai dengan selesainya kegiatan, semua administrasi dan diterbitkannya sertifikat serta laporan kegiatan.

Halaman 4 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

1. Biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA yang akan disetorkan kepada PIHAK KEDUA.
2. Biaya kontribusi yang disepakati sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) per peserta dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2026.
3. Tata cara pembayaran biaya kontribusi dibayarkan non tunai oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, sebelum belangsungnya kegiatan.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN LAIN**

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Halaman 5 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan di antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan kegiatan diusahakan diselesaikan secara damai dengan musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh kedua belah pihak.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 4 (empat) rangkap terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing. Satu asli masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN  
PURBALINGGA





**EDHY SURYONO, S.Sos., M.M.**  
PURNIPD. 680829 199001 1 002

PIHAK KEDUA  
REKTOR UNIVERSITAS AKI



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., M.M.**  
NIDN. 0609027101

Halaman 6 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



**SURAT  
PERMOHONAN  
REKOMENDASI**

Nomor : 020/SM/REK/UNAKI/I/2026  
Lampiran : 1 bendel  
Perihal : **Permohonan Rekomendasi dan Monitoring**

Kepada Yth.  
**Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Provinsi Jawa Tengah**  
Di Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis, bersama ini kami Rektor Universitas AKI bermaksud untuk mengajukan Permohonan Rekomendasi dan Monitoring kegiatan Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Rabu s.d Sabtu  
Tanggal : 04 – 07 Februari 2026  
Peserta : Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga  
Jumlah : 49 Orang  
Tempat Pelaksanaan : Hotel “**Grand Karlita**” Jl. S. Parman No. 296, Purwokerto  
Banyumas 53141

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan agar dapat diterima dan diberikan rekomendasi. Atas bimbingan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 23 Januari 2026  
Rektor,



**Unaki**  
Universitas AKI

**Prof. Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.**  
NIDN. 0609027101

Tembusan ;

1. Kepala LPPM Universitas AKI
2. Arsip



**SURAT  
REKOMENDASI  
BPSDMD**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263  
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

Semarang, 27 Januari 2026

Nomor : 893/PT11/1130.667/2026

Kepada :

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan  
Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan  
Anggota DPRD Kabupaten  
Purbalingga

Rektor Universitas AKI  
di  
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 020/SM/REK/UNAKI/I/2026, tanggal 23 Januari 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2026 sampai dengan 07 Februari 2026 bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
  - a. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah ;
  - b. Strategi Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah yang Efektif dan Tepat Sasaran;
  - c. Character Building : Menjadi Anggota DPRD yang Profesional, Berintegritas dan Berjiwa Kepemimpinan;
  - d. Focus Group Discussion (FGD);
4. Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas AKI;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH**

Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah



**Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19760730 200112 2 003

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
  2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  3. Bupati Purbalingga;
  4. Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga;
-



# **DAFTAR HADIR PESERTA**

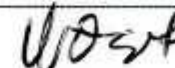
### DAFTAR HADIR

#### BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PURBALINGGA

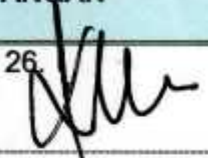
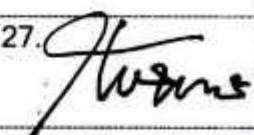


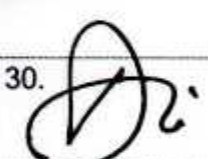


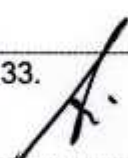
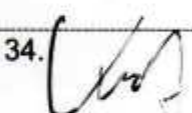
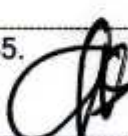

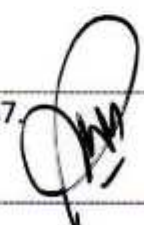


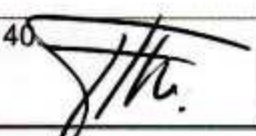
"Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel"

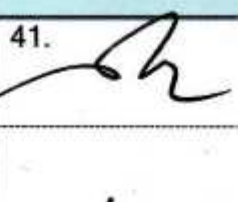



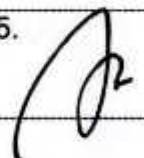



Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026

Hari/Tanggal : Rabu, 04 Februari 2026  
 Jam : 14.00 - 18.00 WIB  
 Acara : Cek In & Registrasi Peserta

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., M.M.	Ketua	1. 	
2.	H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		2. 
3.	ARIS WIDIARSO, S.H.	Wakil Ketua	3. 	
4.	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		4. 
5.	IMAWAN TAQIUDIN	Anggota	5. 	
6.	KARSENNO, S.H., M.M.	Anggota		6. 
7.	H. TONGAT, S.H., M.M.	Anggota	7. 	
8.	ERNI WIDYAWATI, S.Sos.	Anggota		8. 
9.	WURIYATI, A.Md.	Anggota	9. 	
10.	BAYU WIDYATAMA	Anggota		10. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11.	USWATUN KHASANAH	Anggota	11. 
12.	ANDHIKA WISNU MOYO	Anggota	12. 
13.	DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H.	Anggota	13. 
14.	NURANI DIAH PERMATASARI	Anggota	14. 
15.	AGUS PRIYANTO	Anggota	15. 
16.	H. KATNO, S.T.	Anggota	16. 
17.	Drs. LUKMANUDIN	Anggota	17. 
18.	MISWANTO, M.Pd.	Anggota	18. 
19.	H. HAMID, S.H.	Anggota	19. 
20.	PUPUT ADI PURNOMO	Anggota	20. 
21.	SABILA RIZKI FEBRIANA, A.Md., Kes.	Anggota	21. 
22.	Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H.	Anggota	22. 
23.	Hj. ERLIYATI, S.E.	Anggota	23. 
24.	H. SAHLAN	Anggota	24. 
25.	CAHYO SUSILO, A.Md., RO	Anggota	25. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	SUMARSIH, S.IP., M.Pd.	Anggota		26. 
27.	SITI SIFA, S.Pd.	Anggota	27. 	
28.	NIKEN HINDRIANINGSIH	Anggota		28. 
29.	PADANG KUSUMO, S.H.	Anggota	29. 	
30.	DIDIK SUPRAYOGI, A.Md	Anggota		30. 
31.	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	Anggota	31. 	
32.	TEGUH DWIYANTO, S.T.	Anggota		32. 
33.	ADI SUPRIYANTO, S.H.	Anggota	33. 	
34.	UUT TRIAS YANUAR	Anggota		34. 
35.	IDRUS ANJASMORO, A.Md	Anggota	35. 	
36.	H. ADI YUWONO, S.H.	Anggota		36. 
37.	Hj. YUNIARTI, S.H.	Anggota	37. 	
38.	MUGI WAHYUDI, S.AP	Anggota		38. 
39.	BAMBANG SUPRIYANTO, S.H.	Anggota	39. 	
40.	FIARDHA ANGGAR KUSUMA, S.K.M.	Anggota		40. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	SARJONO, S.Pd., M.Si.	Anggota	41.	
42.	Drs. H. MUGO WALUYO	Anggota		42. 
43.	SUHARTO, S.H.	Anggota	43.	
44.	MUSOFAN, S.Si.	Anggota		44. 
45.	H. IN'AM BIROHMATILLAH	Anggota	45.	
46.	LIA MAHFUROH, A.Md.	Anggota		46. 
47.	SUNARKO, S.H.	Anggota	47.	
48.	PREDI SETIAJI, S.H.	Anggota		48. 
49.	H. KHODIRIN, S.H.	Anggota	49.	

## DAFTAR HADIR

### BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka  
 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026

Hari/Tanggal : Kamis, 05 Februari 2026

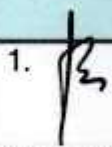
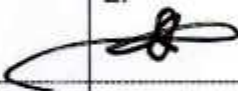

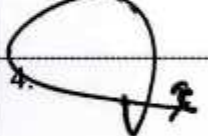
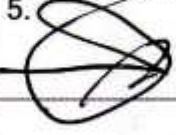
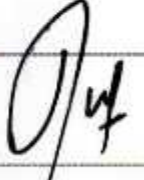
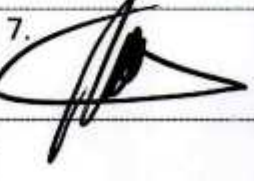
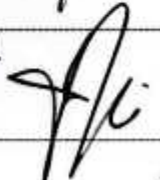
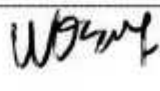

Jam : 07.30 - 11.45 WIB

Acara : PEMBUKAAN & SAMBUTAN

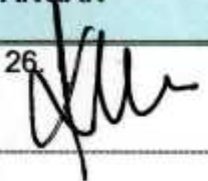
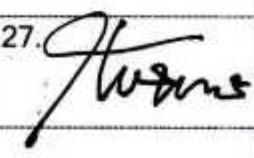


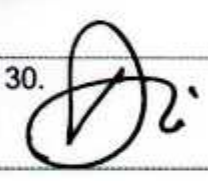


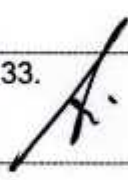
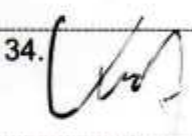
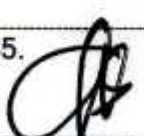
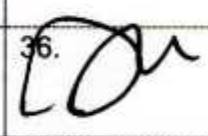
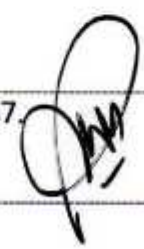

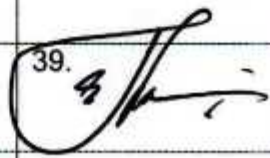

(Rektor Universitas AKI & Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga)

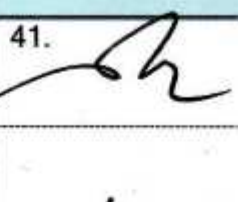



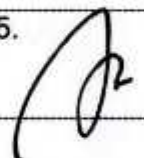




Materi 1 : Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

Narasumber : Vivin Gunawan, S.STP., MA., Ak., CA.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., M.M.	Ketua	1. 	
2.	H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		2. 
3.	ARIS WIDIARSO, S.H.	Wakil Ketua	3. 	
4.	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		4. 
5.	IMAWAN TAQIUDIN	Anggota	5. 	
6.	KARSEN0, S.H., M.M.	Anggota		6. 
7.	H. TONGAT, S.H., M.M.	Anggota	7. 	
8.	ERNI WIDYAWATI, S.Sos.	Anggota		8. 
9.	WURIYATI, A.Md.	Anggota	9. 	
10.	BAYU WIDYATAMA	Anggota		10. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11.	USWATUN KHASANAH	Anggota	11. 
12.	ANDHIKA WISNU MOYO	Anggota	12. 
13.	DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H.	Anggota	13. 
14.	NURANI DIAH PERMATASARI	Anggota	14. 
15.	AGUS PRIYANTO	Anggota	15. 
16.	H. KATNO, S.T.	Anggota	16. 
17.	Drs. LUKMANUDIN	Anggota	17. 
18.	MISWANTO, M.Pd.	Anggota	18. 
19.	H. HAMID, S.H.	Anggota	19. 
20.	PUPUT ADI PURNOMO	Anggota	20. 
21.	SABILA RIZKI FEBRIANA, A.Md., Kes.	Anggota	21. 
22.	Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H.	Anggota	22. 
23.	Hj. ERLIYATI, S.E.	Anggota	23. 
24.	H. SAHLAN	Anggota	24. 
25.	CAHYO SUSILO, A.Md., RO	Anggota	25. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	SUMARSIH, S.IP., M.Pd.	Anggota		26. 
27.	SITI SIFA, S.Pd.	Anggota	27. 	
28.	NIKEN HINDRIANINGSIH	Anggota		28. 
29.	PADANG KUSUMO, S.H.	Anggota	29. 	
30.	DIDIK SUPRAYOGI, A.Md	Anggota		30. 
31.	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	Anggota	31. 	
32.	TEGUH DWIYANTO, S.T.	Anggota		32. 
33.	ADI SUPRIYANTO, S.H.	Anggota	33. 	
34.	UUT TRIAS YANUAR	Anggota		34. 
35.	IDRUS ANJASMORO, A.Md	Anggota	35. 	
36.	H. ADI YUWONO, S.H.	Anggota		36. 
37.	Hj. YUNIARTI, S.H.	Anggota	37. 	
38.	MUGI WAHYUDI, S.AP	Anggota		38. 
39.	BAMBANG SUPRIYANTO, S.H.	Anggota	39. 	
40.	FIARDHA ANGGAR KUSUMA, S.K.M.	Anggota		40. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	SARJONO, S.Pd., M.Si.	Anggota	41.	
42.	Drs. H. MUGO WALUYO	Anggota		42. 
43.	SUHARTO, S.H.	Anggota	43.	
44.	MUSOFAN, S.Si.	Anggota		44. 
45.	H. IN'AM BIROHMATILLAH	Anggota	45.	
46.	LIA MAHFUROH, A.Md.	Anggota		46. 
47.	SUNARKO, S.H.	Anggota	47.	
48.	PREDI SETIAJI, S.H.	Anggota		48. 
49.	H. KHODIRIN, S.H.	Anggota	49.	

### DAFTAR HADIR

#### BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel"




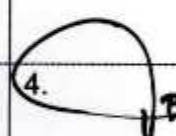
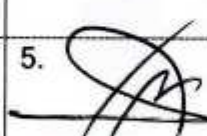
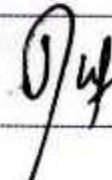
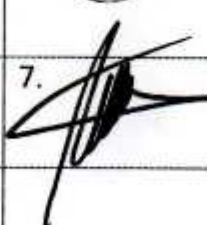
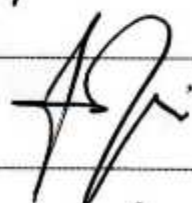
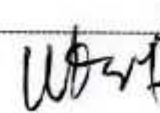
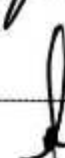
Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026

Hari/Tanggal : Kamis, 05 Februari 2026

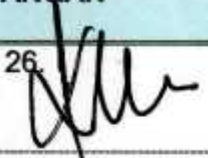
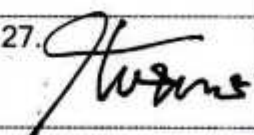


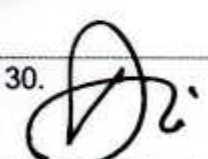


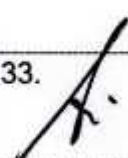
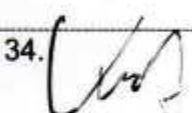
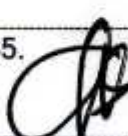

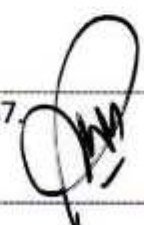


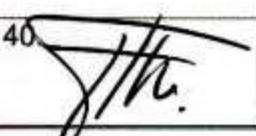
Jam : 13.30 - 17.15 WIB

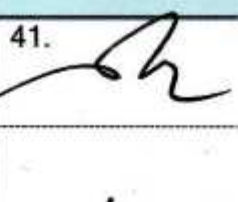



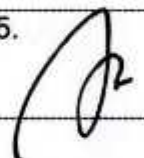




Materi 2 : Strategi Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah yang Efektif dan Tepat Sasaran

Narasumber : Vivin Gunawan, S.STP., MA., Ak., CA.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., M.M.	Ketua	1. 	
2.	H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		2. 
3.	ARIS WIDIARSO, S.H.	Wakil Ketua	3. 	
4.	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		4. 
5.	IMAWAN TAQIUDIN	Anggota	5. 	
6.	KARSENNO, S.H., M.M.	Anggota		6. 
7.	H. TONGAT, S.H., M.M.	Anggota	7. 	
8.	ERNI WIDYAWATI, S.Sos.	Anggota		8. 
9.	WURIYATI, A.Md.	Anggota	9. 	
10.	BAYU WIDYATAMA	Anggota		10. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11.	USWATUN KHASANAH	Anggota	11. 
12.	ANDHIKA WISNU MOYO	Anggota	12. 
13.	DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H.	Anggota	13. 
14.	NURANI DIAH PERMATASARI	Anggota	14. 
15.	AGUS PRIYANTO	Anggota	15. 
16.	H. KATNO, S.T.	Anggota	16. 
17.	Drs. LUKMANUDIN	Anggota	17. 
18.	MISWANTO, M.Pd.	Anggota	18. 
19.	H. HAMID, S.H.	Anggota	19. 
20.	PUPUT ADI PURNOMO	Anggota	20. 
21.	SABILA RIZKI FEBRIANA, A.Md., Kes.	Anggota	21. 
22.	Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H.	Anggota	22. 
23.	Hj. ERLIYATI, S.E.	Anggota	23. 
24.	H. SAHLAN	Anggota	24. 
25.	CAHYO SUSILO, A.Md., RO	Anggota	25. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	SUMARSIH, S.IP., M.Pd.	Anggota		26. 
27.	SITI SIFA, S.Pd.	Anggota	27. 	
28.	NIKEN HINDRIANINGSIH	Anggota		28. 
29.	PADANG KUSUMO, S.H.	Anggota	29. 	
30.	DIDIK SUPRAYOGI, A.Md	Anggota		30. 
31.	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	Anggota	31. 	
32.	TEGUH DWIYANTO, S.T.	Anggota		32. 
33.	ADI SUPRIYANTO, S.H.	Anggota	33. 	
34.	UUT TRIAS YANUAR	Anggota		34. 
35.	IDRUS ANJASMORO, A.Md	Anggota	35. 	
36.	H. ADI YUWONO, S.H.	Anggota		36. 
37.	Hj. YUNIARTI, S.H.	Anggota	37. 	
38.	MUGI WAHYUDI, S.AP	Anggota		38. 
39.	BAMBANG SUPRIYANTO, S.H.	Anggota	39. 	
40.	FIARDHA ANGGAR KUSUMA, S.K.M.	Anggota		40. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	SARJONO, S.Pd., M.Si.	Anggota	41.	
42.	Drs. H. MUGO WALUYO	Anggota		42. 
43.	SUHARTO, S.H.	Anggota	43.	
44.	MUSOFAN, S.Si.	Anggota		44. 
45.	H. IN'AM BIROHMATILLAH	Anggota	45.	
46.	LIA MAHFUROH, A.Md.	Anggota		46. 
47.	SUNARKO, S.H.	Anggota	47.	
48.	PREDI SETIAJI, S.H.	Anggota		48. 
49.	H. KHODIRIN, S.H.	Anggota	49.	

## DAFTAR HADIR

### BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka  
 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel"

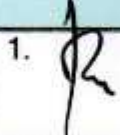


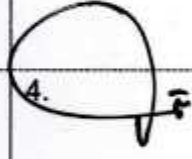
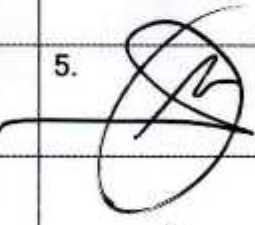
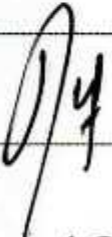
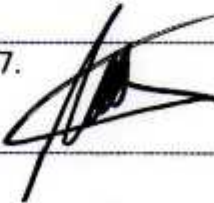
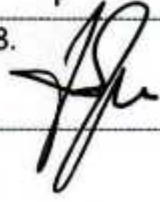
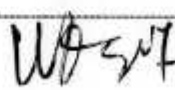

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026

Hari/Tanggal : Jum'at, 06 Februari 2026

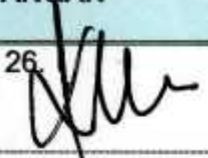
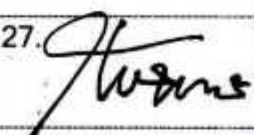





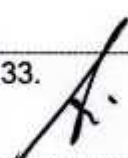
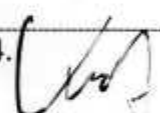
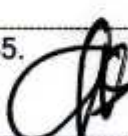

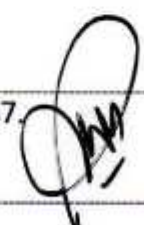


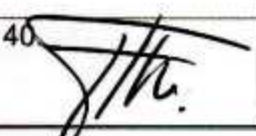
Jam : 07.30 - 11.15 WIB

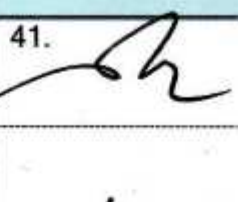



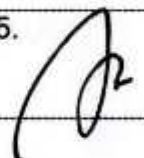




Materi 3 : Character Building : Menjadi Anggota DPRD yang Profesional, Berintegritas dan Berjiwa Kepemimpinan

Narasumber : Eko Suseno Hendro Riyadi Matruty, S.E., M.M., PFC.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., M.M.	Ketua	1. 	
2.	H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		2. 
3.	ARIS WIDIARSO, S.H.	Wakil Ketua	3. 	
4.	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		4. 
5.	IMAWAN TAQIUDIN	Anggota	5. 	
6.	KARSEN0, S.H., M.M.	Anggota		6. 
7.	H. TONGAT, S.H., M.M.	Anggota	7. 	
8.	ERNI WIDYAWATI, S.Sos.	Anggota		8. 
9.	WURIYATI, A.Md.	Anggota	9. 	
10.	BAYU WIDYATAMA	Anggota		10. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11.	USWATUN KHASANAH	Anggota	11. 
12.	ANDHIKA WISNU MOYO	Anggota	12. 
13.	DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H.	Anggota	13. 
14.	NURANI DIAH PERMATASARI	Anggota	14. 
15.	AGUS PRIYANTO	Anggota	15. 
16.	H. KATNO, S.T.	Anggota	16. 
17.	Drs. LUKMANUDIN	Anggota	17. 
18.	MISWANTO, M.Pd.	Anggota	18. 
19.	H. HAMID, S.H.	Anggota	19. 
20.	PUPUT ADI PURNOMO	Anggota	20. 
21.	SABILA RIZKI FEBRIANA, A.Md., Kes.	Anggota	21. 
22.	Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H.	Anggota	22. 
23.	Hj. ERLIYATI, S.E.	Anggota	23. 
24.	H. SAHLAN	Anggota	24. 
25.	CAHYO SUSILO, A.Md., RO	Anggota	25. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	SUMARSIH, S.IP., M.Pd.	Anggota		26. 
27.	SITI SIFA, S.Pd.	Anggota	27. 	
28.	NIKEN HINDRIANINGSIH	Anggota		28. 
29.	PADANG KUSUMO, S.H.	Anggota	29. 	
30.	DIDIK SUPRAYOGI, A.Md	Anggota		30. 
31.	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	Anggota	31. 	
32.	TEGUH DWIYANTO, S.T.	Anggota		32. 
33.	ADI SUPRIYANTO, S.H.	Anggota	33. 	
34.	UUT TRIAS YANUAR	Anggota		34. 
35.	IDRUS ANJASMORO, A.Md	Anggota	35. 	
36.	H. ADI YUWONO, S.H.	Anggota		36. 
37.	Hj. YUNIARTI, S.H.	Anggota	37. 	
38.	MUGI WAHYUDI, S.AP	Anggota		38. 
39.	BAMBANG SUPRIYANTO, S.H.	Anggota	39. 	
40.	FIARDHA ANGGAR KUSUMA, S.K.M.	Anggota		40. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
41.	SARJONO, S.Pd., M.Si.	Anggota	41. 
42.	Drs. H. MUGO WALUYO	Anggota	42. 
43.	SUHARTO, S.H.	Anggota	43. 
44.	MUSOFAN, S.Si.	Anggota	44. 
45.	H. IN'AM BIROHMATILLAH	Anggota	45. 
46.	LIA MAHFUROH, A.Md.	Anggota	46. 
47.	SUNARKO, S.H.	Anggota	47. 
48.	PREDI SETIAJI, S.H.	Anggota	48. 
49.	H. KHODIRIN, S.H.	Anggota	49. 


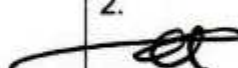

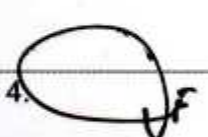
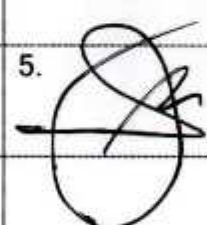
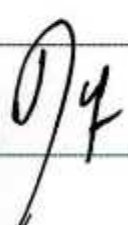


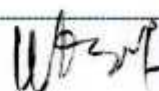

## DAFTAR HADIR

### BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PURBALINGGA

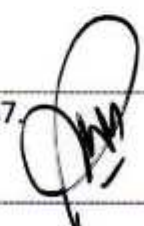
"Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka  
 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel"

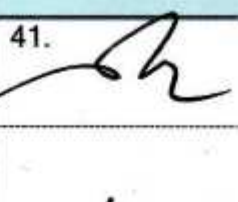



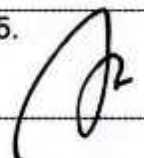




Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026

Hari/Tanggal : Jum'at, 06 Februari 2026  
 Jam : 13.30 - 17.15 WIB  
 Materi 4 : Focus Group Discussion (FGD)  
 Fasilitator : Tim Universitas AKI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., M.M.	Ketua	1. 	
2.	H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		2. 
3.	ARIS WIDIARSO, S.H.	Wakil Ketua	3. 	
4.	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		4. 
5.	IMAWAN TAQIUDIN	Anggota	5. 	
6.	KARSENNO, S.H., M.M.	Anggota		6. 
7.	H. TONGAT, S.H., M.M.	Anggota	7. 	
8.	ERNI WIDYAWATI, S.Sos.	Anggota		8. 
9.	WURIYATI, A.Md.	Anggota	9. 	
10.	BAYU WIDYATAMA	Anggota		10. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11.	USWATUN KHASANAH	Anggota	11. 
12.	ANDHIKA WISNU MOYO	Anggota	12. 
13.	DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H.	Anggota	13. 
14.	NURANI DIAH PERMATASARI	Anggota	14. 
15.	AGUS PRIYANTO	Anggota	15. 
16.	H. KATNO, S.T.	Anggota	16. 
17.	Drs. LUKMANUDIN	Anggota	17. 
18.	MISWANTO, M.Pd.	Anggota	18. 
19.	H. HAMID, S.H.	Anggota	19. 
20.	PUPUT ADI PURNOMO	Anggota	20. 
21.	SABILA RIZKI FEBRIANA, A.Md., Kes.	Anggota	21. 
22.	Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H.	Anggota	22. 
23.	Hj. ERLIYATI, S.E.	Anggota	23. 
24.	H. SAHLAN	Anggota	24. 
25.	CAHYO SUSILO, A.Md., RO	Anggota	25. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	SUMARSIH, S.IP., M.Pd.	Anggota		26. 
27.	SITI SIFA, S.Pd.	Anggota	27. 	
28.	NIKEN HINDRIANINGSIH	Anggota		28. 
29.	PADANG KUSUMO, S.H.	Anggota	29. 	
30.	DIDIK SUPRAYOGI, A.Md	Anggota		30. 
31.	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	Anggota	31. 	
32.	TEGUH DWIYANTO, S.T.	Anggota		32. 
33.	ADI SUPRIYANTO, S.H.	Anggota	33. 	
34.	UUT TRIAS YANUAR	Anggota		34. 
35.	IDRUS ANJASMORO, A.Md	Anggota	35. 	
36.	H. ADI YUWONO, S.H.	Anggota		36. 
37.	Hj. YUNIARTI, S.H.	Anggota	37. 	
38.	MUGI WAHYUDI, S.AP	Anggota		38. 
39.	BAMBANG SUPRIYANTO, S.H.	Anggota	39. 	
40.	FIARDHA ANGGAR KUSUMA, S.K.M.	Anggota		40. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
41.	SARJONO, S.Pd., M.Si.	Anggota	41. 
42.	Drs. H. MUGO WALUYO	Anggota	42. 
43.	SUHARTO, S.H.	Anggota	43. 
44.	MUSOFAN, S.Si.	Anggota	44. 
45.	H. IN'AM BIROHMATILLAH	Anggota	45. 
46.	LIA MAHFUROH, A.Md.	Anggota	46. 
47.	SUNARKO, S.H.	Anggota	47. 
48.	PREDI SETIAJI, S.H.	Anggota	48. 
49.	H. KHODIRIN, S.H.	Anggota	49. 

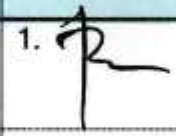
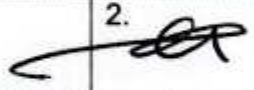

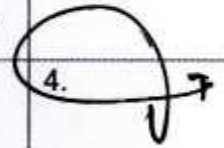
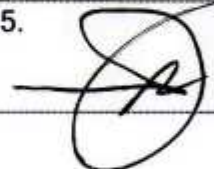
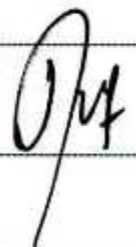


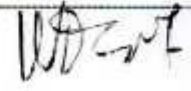

## DAFTAR HADIR

### BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PURBALINGGA

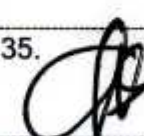
"Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka  
 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel"

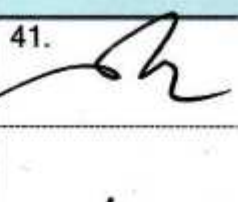



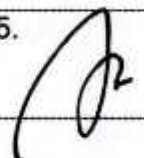



Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026

Hari/Tanggal : Sabtu, 07 Februari 2026  
 Jam : 09.00 - 11.00 WIB  
 Acara : Perumusan Hasil Diskusi dan Evaluasi Kegiatan  
**PENUTUPAN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., M.M.	Ketua	1. 	
2.	H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		2. 
3.	ARIS WIDIARSO, S.H.	Wakil Ketua	3. 	
4.	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		4. 
5.	IMAWAN TAQIUDIN	Anggota	5. 	
6.	KARSENNO, S.H., M.M.	Anggota		6. 
7.	H. TONGAT, S.H., M.M.	Anggota	7. 	
8.	ERNI WIDYAWATI, S.Sos.	Anggota		8. 
9.	WURIYATI, A.Md.	Anggota	9. 	
10.	BAYU WIDYATAMA	Anggota		10. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
11.	USWATUN KHASANAH	Anggota	11.	
12.	ANDHIKA WISNU MOYO	Anggota		<del>12.</del> 
13.	DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H.	Anggota	13.	
14.	NURANI DIAH PERMATASARI	Anggota		14. 
15.	AGUS PRIYANTO	Anggota	15.	
16.	H. KATNO, S.T.	Anggota		16. 
17.	Drs. LUKMANUDIN	Anggota	17.	
18.	MISWANTO, M.Pd.	Anggota		18. 
19.	H. HAMID, S.H.	Anggota	19.	
20.	PUPUT ADI PURNOMO	Anggota		20. 
21.	SABILA RIZKI FEBRIANA, A.Md., Kes.	Anggota	21.	
22.	Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H.	Anggota		22. 
23.	Hj. ERLIYATI, S.E.	Anggota	23.	
24.	H. SAHLAN	Anggota		24. 
25.	CAHYO SUSILO, A.Md., RO	Anggota	25.	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	SUMARSIH, S.IP., M.Pd.	Anggota		26. 
27.	SITI SIFA, S.Pd.	Anggota	27. 	
28.	NIKEN HINDRIANINGSIH	Anggota		28. 
29.	PADANG KUSUMO, S.H.	Anggota	29. 	
30.	DIDIK SUPRAYOGI, A.Md	Anggota		30. 
31.	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	Anggota	31. 	
32.	TEGUH DWIYANTO, S.T.	Anggota		32. 
33.	ADI SUPRIYANTO, S.H.	Anggota	33. 	
34.	UUT TRIAS YANUAR	Anggota		34. 
35.	IDRUS ANJASMORO, A.Md	Anggota	35. 	
36.	H. ADI YUWONO, S.H.	Anggota		36. 
37.	Hj. YUNIARTI, S.H.	Anggota	37. 	
38.	MUGI WAHYUDI, S.AP	Anggota		38. 
39.	BAMBANG SUPRIYANTO, S.H.	Anggota	39. 	
40.	FIARDHA ANGGAR KUSUMA, S.K.M.	Anggota		40. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	SARJONO, S.Pd., M.Si.	Anggota	41.	
42.	Drs. H. MUGO WALUYO	Anggota		42. 
43.	SUHARTO, S.H.	Anggota	43.	
44.	MUSOFAN, S.Si.	Anggota		44. 
45.	H. IN'AM BIROHMATILLAH	Anggota	45.	
46.	LIA MAHFUROH, A.Md.	Anggota		46. 
47.	SUNARKO, S.H.	Anggota	47.	
48.	PREDI SETIAJI, S.H.	Anggota		48. 
49.	H. KHODIRIN, S.H.	Anggota	49.	



# **DAFTAR HADIR NARASUMBER**



# UNIVERSITAS AKI





LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang  
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111  
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

## DAFTAR HADIR NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

“Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka  
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026

HARI/TANGGAL	MATERI	TANDA TANGAN
Kamis, 05 Februari 2026	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah	 <u>Vivin Gunawan, S.STP., MA., Ak., CA</u> Analisis Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah/Kemendagri
	Strategi Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah yang Efektif dan Tepat Sasaran	 <u>Vivin Gunawan, S.STP., MA., Ak., CA</u> Analisis Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri
Jum'at, 06 Februari 2026	Character Building : Menjadi Anggota DPRD yang Profesional, Berintegritas dan Berjiwa Kepemimpinan  Focus Group Discussion (FGD)	 <u>Eko Suseno Hendro Riyadi Matruty, S.E., M.M., PFC.</u> (SMARTSIA Training & Consultant)   Tim Universitas AKI



# **BIODATA NARASUMBER**



# UNIVERSITAS AKI

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang  
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111  
e-mail : [lppm@unaki.ac.id](mailto:lppm@unaki.ac.id), website: [www.unaki.ac.id](http://www.unaki.ac.id)

---

### BIODATA NARASUMBER

Nama : Vivin Gunawan, S.STP., M.A., Ak., C.A.

Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 13 Desember 1989

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri

Jabatan : Analis Perencanaan Anggaran Daerah (Evaluator APBD)

No. Telp/Hp. : 08111728844

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat

Demikian biodata ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**VIVIN GUNAWAN,S.STP., M.A.,Ak.,CA**

**Analisis Perencanaan Anggaran Daerah  
(Evaluator APBD)**

**Ditjen Bina Keuangan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri**

**NOMOR INDUK PNS**

19891213 201406 1 001

**PANGKAT /GOLONGAN**

Penata /III.c

**HUBUNGI SAYA**

Alamat Kantor : Jalan  
Medan Merdeka Utara  
No.7 Jakarta Pusat

Ponsel: 0811 1728 844

Email :  
gunawanvivin21@gmail.  
com

**TEMPAT, TANGGAL LAHIR**

Bekasi, 13 Desember 1989

**JENIS KELAMIN**

Laki-Laki

**PENDIDIKAN**

- D4-Prodi Keuangan Daerah IPDN 2014.
- S2- Ilmu Administrasi STIAMI 2018.
- Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) Perbanas TA 2023/2024.
- Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- S3 - Program Studi Administasi Universitas Brawijaya Kampus Jakarta TA 2024 - sekarang.

**AGAMA**

Islam

**STATUS**

Menikah

**NOMOR REKENING**

009401036934501 (BRI)

**NAMA DI REKENING**

Vivin Gunawan

**NPWP**

70.678.373.5-432.000

**BIODATA NARASUMBER**

Nama : Eko Suseno Hendro Riyadi Matruty, S.E., M.M., PFC.  
 Tempat/Tanggal Lahir : Salatiga, 20 September 1977  
 No. Hp : 0812 2874 993  
 E\_mail : [Eko.suseno@uksw.edu](mailto:Eko.suseno@uksw.edu)  
 Alamat : Jl. Gunung 325 Rt 3 / RW 1 Semarang

Riwayat Pendidikan :

No.	Pendidikan	Tahun
1.	S1 - SE (FEB UKSW)	
2.	S2 - MM (USM)	
3.	Sertifikat PFC (Singapore)	

Riwayat Karir :

No.	Pekerjaan	Tahun
1.	Dosen FEB UKSW Salatiga	
2.	Dosen di Beberapa PTS Jawa dan Sumba	
3.	Ketua MARTCON (Manajemen Researc Training & Consultan)	
4.	Associated Partner Beberapa Perusahaan Konsultan	
5.	Trainer Pengembangan SDM PERBANKAN, BPR, LKM & KOPERASI	
6.	Direktur SMARTSIA Consulting	
7.	Konsultan Astra Honda Motor	
8.	Konsultan Bank Danamon	
9.	Konsultan SMT Indosat	
10.	Konsultan Sari Husada	
11.	Konsultan Sumber Agung Group	
12.	Konsultan BKD Provinsi Jawa Tengah	
13.	Financial Consultant @Prudential Life Assurance	
14.	Tenaga Ahli Yayasan Danamon Peduli	
15.	Tenaga Ahli TTI Provinsi Jawa Tengah	
16.	Tenaga Ahli DPRD Provinsi Jawa Tengah	



# UNIVERSITAS AKI

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang  
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111  
e-mail : [lppm@unaki.ac.id](mailto:lppm@unaki.ac.id), website: [www.unaki.ac.id](http://www.unaki.ac.id)

Organisasi :

No.	Organisasi	Tahun
1.	FEB UKSW Salatiga	
2.	SMARTSIA Training & Consultan	



# **DAFTAR HADIR MODERATOR**







# UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang  
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111  
e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

## DAFTAR HADIR MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

“Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka  
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel”  
Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026

HARI/TANGGAL	MATERI	TANDA TANGAN
Kamis, 05 Februari 2026	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah	 <u>Annisa Fatathil Hidayah A., S.Sos.</u> MC & Moderator
	Strategi Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah yang Efektif dan Tepat Sasaran	 <u>Annisa Fatathil Hidayah A., S.Sos.</u> MC & Moderator
Jum'at, 06 Februari 2026	Character Building : Menjadi Anggota DPRD yang Profesional, Berintegritas dan Berjiwa Kepemimpinan	 <u>Annisa Fatathil Hidayah A., S.Sos.</u> MC & Moderator
	Focus Group Discussion (FGD)	 <u>Annisa Fatathil Hidayah A., S.Sos.</u> MC & Moderator



# **BIODATA MODERATOR**



**BIODATA MODERATOR**

Nama : Annisa Fathatil Hidayah A., S.Sos

Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 13 Januari 2021

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Master Of Ceremony & Moderator

Jabatan : -

No. Telp/Hp. : 081220050055

Alamat : Purwokerto

Demikian biodata ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



# Curriculum Vitae

Annisa Fathatil Hidayah A. S.Sos  
Banyumas, 13 Januari 2001



## TENTANG SAYA

Seorang public speaker berpengalaman dengan keahlian dalam menginspirasi audiens dan menyampaikan pesan dengan percaya diri. Terbukti memiliki kemampuan komunikasi yang kuat dan mampu beradaptasi dengan berbagai jenis publik.

FOUNDER BERANI BERBICARA CLASS PURWOKERTO

081220060055

NYONYAGABUT@GMAIL.COM



## PENGALAMAN KERJA

### 1. PUBLIC RELATION FEST MANAGEMENT SURABAYA

2023 - 2024

### 2. Content Creator PT Refo Digital Kreatif Talent Koordinator PT Refo Digital Kreatif

2024 - 2025



## PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Komplek Ponpes Alhikmah 2 Brebes, 2018/2019
2. Koordinator Ekstrakurikuler OSIS SMA Alhikmah 2 Brebes, 2018/2019
3. Koordinator Advokasi dan Komunikasi HMJ KPI UIN SAIZU 2021/2022
4. Ketua Bidang Advokasi dan Kajian Strategis DEMA Fakultas Dakwah UIN SAIZU 2022/2023
5. Wakil Ketua 1 PMII Rayon Dakwah 2022/2023 UIN SAIZU PURWOKERTO
6. Ketua Umum Komunitas Motivator UIN SAIZU 2021 UIN SAIZU PURWOKERTO



## RIWAYAT PENDIDIKAN

- MI DARUL HIKMAH PURWOKERTO BARAT
- SMP takhassus al - qur'an kalibeber, wonosobo
- SMA AL - HIKMAH 2 SIRAMPOG BREBES
- S1 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM UIN SAIZU PURWOKERTO



# Public Speaking Experience

Annisa Fathatil Hidayah A. S.Sos  
Banyumas, 13 Januari 2001



1. MC Bank Indonesia Purwokerto 2021
2. Pembicara Closing PBAK FAKDA 2021 "Motivasi Maba"
3. Pembicara Content Creator Faktapala UIN SAIZU Purwokerto 2021
4. Pembicara Sosialisasi penting melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Satap Pagedongan Banjarnegara
5. Guest Speak #milennialproduktif Samarinda "Menjadi Public Speaker terbaikmu" 2022
6. Pembicara Seminar Motivasi Santri di Ponpes Darul Falah Purwokerto
7. Pembicara Workshop Digitalisasi di Lumbir 2023
8. Pembicara Seminar Motivasi "Mental Awareness" SMPN 3 Pulosari Pemalang
9. Pembicara pelatihan "Digital Marketing" di Pemalang 2023

10. Pembicara "Pelatihan Public Speaking" di UIN Saizu Purwokerto 2023
11. Pembicara Seminar "Woman Milenial" Dema Syariah UIN Saizu Purwokerto 2023
12. HOST KONSER NDX AKA di Terminal Bulupitu Purwokerto, 2023
13. MC Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (KEMENPAREKRAF), di Hotel Aston Purwokerto 2024
14. Pembicara Sosialisasi "Kesehatan Mental Remaja SMP" SMNP 2 Susukan Banjarnegara 2024
15. Pembicara "Green Self Care" Talkshow Motivasi Purwokerto 2024
16. Pembicara Seminar "Public Speaking" UIN SAIZU Fakultas Bisnis Islam 2024
17. Pembicara "PBAK UIN SAIZU 2024" Motivasi Mahasiswa Baru, 2024
18. Pembicara "Personal Branding" SMA Ma'arif Karangmoncol Purbalingga, 2024
19. MC "Meet and Share Kopdar Pebisnis Purbalingga" by Kiriminaja 2024
20. HOST "Konser Parade Hujan" Diesnatalis UIN SAIZU Purwokerto 2024
21. Pembicara "Workshop. Media Kreativitas Muda Digitalisasi" UIN SAIZU 2024
22. MC "HUT Boersa Kampus" Purwokerto 2024
23. MC "Malam penganugerahan KPU Banyumas & KPU Provinsi Jawa Tengah" 2025
24. Pembicara "Pelatihan Konten Kreatif Penyuluh Agama Islam Purbalingga" 2025
25. Pembicara "Pelatihan Modetator Konten Kreatif Penyuluh Agama Islam Cilacap" 2025



# Public Speaking Experience

Annisa Fathatil Hidayah A. S.Sos  
Banyumas, 13 Januari 2001



- 26. Pembicara Pelatihan Master Of Ceremony BBC Purwokerto 2025
- 27. MC InstaMeet Media SePurwokerto 2025
- 28. Pembicara pelatihan digital marketing DiFabel seDKI Jakarta 2025
- 29. MC Program Si Iklas Difabel Setara Sandiaga Uno Jakarta 2025
- 30. Pembicara Pelatihan Videografer Difabel SeDKI Jakarta 2025
- 31. Pembicara Pelatihan Tiktok Affiliate Difabel Tangerang Selatan
- 32. MC Peresmian Studio Kreatif Sandiaga Uno Voffice Jakarta Dll
- 33. Moderator PKKMB UMP 2025
- 34. Pembicara Pelatihan Public Speaking Fakultas Peternakan Unsoed 2025
- 35. Juri KPI Go Talent Comfest Uin Saizu 2025
- 36. Pembicara Training Motivator Komunitas Uin Saizu Purwokerto 2025
- 37. MC Pelatihan Digital Marketing Difabel Sandiaga Uno Yayasan Indonesia Setara Batch 3 Jakarta
- 38. Trainer Pelatihan Content Creator Difabel Sandiagauno Yayasan Indonesia Setara Batch 3 Jakarta, DL





# **KOMPILASI MATERI**

# **PENDALAMAN TUGAS BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA**

---



## **Materi Pembahasan :**

- 1. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**
- 2. Strategi Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah yang Efektif dan Tepat Sasaran**
- 3. Character Building : Menjadi Anggota DPRD yang Profesional, Berintegritas dan Berjiwa Kepemimpinan**
- 4. Focus Group Discussion (FGD)**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)**

**U N I V E R S I T A S A K I  
S E M A R A N G  
2 0 2 6**

**PENDALAMAN TUGAS  
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA**

---



**Materi :**

**Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Kepala Daerah**

**Oleh :**

**Vivin Gunawan, S.STP., MA., Ak., CA**  
(Analisis Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri)

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)**

**UNIVERSITAS AKI  
SEMARANG  
2026**



**"PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
KEPALA DAERAH"**

**FUNGSI DPRD DLM KERANGKA REPRESENTASI RAKYAT**



## LANDASAN HUKUM

1. UU 23 TAHUN 2014
2. PP 13 TAHUN 2019
3. PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020

## KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



## SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

### KEBUTUHAN INFORMASI

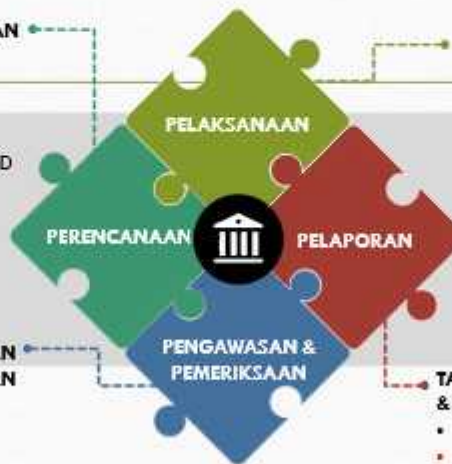
- URUSAN
- BIDANG URUSAN
- PROGRAM
- KEGIATAN
- SUB KEGIATAN
- ORGANISASI
- SUMBER DANA
- LOKASI
- AKUN
- KELOMPOK
- JENIS
- OBJEK
- RINCIAN OBJEK
- SUB RINCIAN OBJEK

### TAHAPAN PERENCANAAN

- RPJMD – Renstra
- RKPD – Renja
- KUA – PPAS
- RKA-SKPD
- Rancangan Perda APBD
- Rancangan Perkada Penjabaran APBD

### TAHAPAN PENGAWASAN & PEMERIKSAAN

- Evaluasi
- Reviu
- Audit
- Statistik



### TAHAPAN PELAKSANAAN

- DPA-SKPD
- Anggaran Kas & SPD
- Transaksi Penerimaan
- Transaksi Pengeluaran (SPP, SPM-SP2D-SPJ)
- Transaksi Akuntansi berbasis Akrual

### TAHAPAN PERTANGGUNGJAWABAN & PELAPORAN

- Laporan Keuangan SKPD & Pemda
- **Laporan Kinerja**

*"kebutuhan informasi harus tersaji secara utuh dan konsisten di setiap tahapan"*

## UU 23 TAHUN 2014

### Pasal 1 angka 2:

"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) TA."

## Tujuan Penyusunan LKPJ

- Mengetahui **Progres (perkembangan) Kepala Daerah (keberhasilan atau kegagalan) dalam menjalankan tugasnya selama 1 (satu) tahun anggaran;**
- Peningkatan **efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pengawasan DPRD**





## TUGAS DAN WEWENANG DLM RANGKA PENGAWASAN



### UU 23 TAHUN 2014

### KEWAJIBAN KEPALA DAERAH

#### Pasal 67 :

##### **Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:**

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
- Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
- Melaksanakan program strategis nasional.
- Menjalin hubungan kerjasama dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua perangkat Daerah.

#### Pasal 69:

- Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban**, ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

## UU 23/2014 tentang PEMERINTAHAN DAERAH

### PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

#### KEPALA DAERAH

#### DPRD

**Pasal 69:**  
menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

#### KEWAJIBAN

**Pasal 101 (h):**  
meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;

**Pasal 154 (h):**  
meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;

Dibantu Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Efisien, Efektif, Transparan, Akuntabel, Tertib, Adil dan Tata Aturan

UU 23 TAHUN 2014

## Muatan LKPJ

### Pasal 71 :

1. hasil **penyelenggaraan Urusan Pemerintahan** yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Kepala Daerah menyampaikan **LKPJ kepada DPRD** yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. LKPJ **dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan** penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### SANKSI

### Pasal 73 :

3. **hak interpelasi**
4. Jika Interpelasi tidak diterima, **DPRD Provinsi melaporkan Gubernur kepada Menteri dan DPRD Kabupaten/Kota melaporkan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.**
5. **sanksi teguran tertulis** kepada Gubernur dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada Bupati/Wali kota.
6. Kepala Daerah **diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan** yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk

## BAGAIMANA FORMAT PELAPORAN LKPJ?

### Pasal 74 :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, **laporan keterangan pertanggungjawaban** dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta tata cara evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) dan pasal 70 ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.”



## PP 13 TAHUN 2019

### PP 13 TAHUN 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

#### Pasal 1 ayat (2)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut **pertanggungjawaban kinerja** yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran



## Pembagian Urusan Pemerintahan



## POKOK-POKOK PERUBAHAN



PP 3/2007	PP 13/2019	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LKPJ terdiri atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan.</li> <li>• Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan &amp; tugas umum pemerintahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LKPJ terdiri atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran.</li> <li>• Ruang lingkup LKPJ meliputi <b>hasil</b> penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah &amp; <b>hasil</b> pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Nomor 23 Tahun 2014, sudah tidak mengamanahkan lagi untuk LKPJ Akhir Masa Jabatan.</li> </ul>

## POKOK-POKOK PERUBAHAN

PP 3/2007	PP 13/2019	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.</li> <li>• Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP 3/2007 tidak ada norma yang mengatur jika KDH berhalangan pada saat penyampaian LKPJ, sehingga pernah terjadi pada saat LKPJ disampaikan oleh Wakil KDH, DPRD menolak LKPJ tersebut dan tidak mau memberikan rekomendasi karena dianggap tidak sah.</li> </ul>

## POKOK-POKOK PERUBAHAN

PP 3/2007	PP 13/2019	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah <b>harus</b> melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan &amp; pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP 3/2007 tidak mewajibkan DPRD dalam 30 memberikan rekomendasi, sifatnya hanya sebagai himbauan, sebab jika 30 DPRD tidak memberikan rekomendasi dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.</li> <li>• PP 13/2019 mewajibkan DPRD dalam waktu paling lambat 30 hari "harus" memberikan rekomendasi terhadap LKPJ.</li> </ul>

## POKOK-POKOK PERUBAHAN

PP 3/2007	PP 13/2019	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam: a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala Daerah.</li> <li>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LKPJ diatur dalam Peraturan Menteri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PP 3/2007 tidak secara spesifik menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadi ide utama bagi DPRD dalam memberikan rekomendasi terhadap LKPJ.</li> <li>Mekanisme/tata cara pembuatan LKPJ berdasarkan PP 13/2019 akan diatur lebih lanjut dalam Permendagri.</li> </ul>

### Dasar LKPJ dalam UU 23/2014 dan PP 13/2019

#### Pasal 71:

Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keterangan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepada masyarakat.

Selanjutnya diatur dalam  
Pasal 15 s.d. 20  
PP 13/2019

## PP 13 TAHUN 2019

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 15 :

Ruang lingkup LKPJ meliputi:

- hasil penyelenggaraan **urusan pemerintahan** yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- hasil pelaksanaan **tugas pembantuan dan penugasan**.

#### Pasal 16:

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi:

- capaian pelaksanaan program dan kegiatan** serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
- kebijakan strategis** yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
- tindak lanjut rekomendasi** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

### Format & Sumber Penyusunan

#### Pasal 18 :

- Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.
- LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

### Siapa dan Kapan disampaikan

#### Pasal 19 :

- Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat **3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir**.
- Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Wakil Kepala Daerah selaku Pelaksana Tugas Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.
- Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Pejabat Pengganti Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.



#### Pasal 20 :

- penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
- penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
- penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

#### Pasal 21 :

"Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LKPJ diatur dalam Peraturan Menteri."



## PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020

# **Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

## Permendagri 18 Tahun 2020

- Penyusunan LKPJ dilakukan oleh kelompok kerja khusus
- Data yang digunakan dalam LKPJ merupakan data yang digunakan untuk menyusun LPPD
- Apabila data yang dibutuhkan untuk penyusunan LKPJ tidak tersedia dalam penyusunan LPPD, maka perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib menyiapkan data sesuai dengan kebutuhan penyusunan LKPJ atau meminta ke badan pusat statistik
- Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh DPRD kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah
- Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh DPRD kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
- Hasil rekomendasi wajib ditindaklanjuti oleh kepala daerah

## lanjutan...

- Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD
  - b. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD
  - c. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada Pemerintah, DPRD dan masyarakat
- Tim Penyusun terdiri dari kelompok kerja khusus untuk penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD
- Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dengan sekretaris daerah provinsi sebagai ketua tim penyusun

## lanjutan...

- Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dengan sekretaris daerah provinsi sebagai ketua tim penyusun
- Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota dengan sekretaris daerah kabupaten/kota sebagai ketua tim penyusun

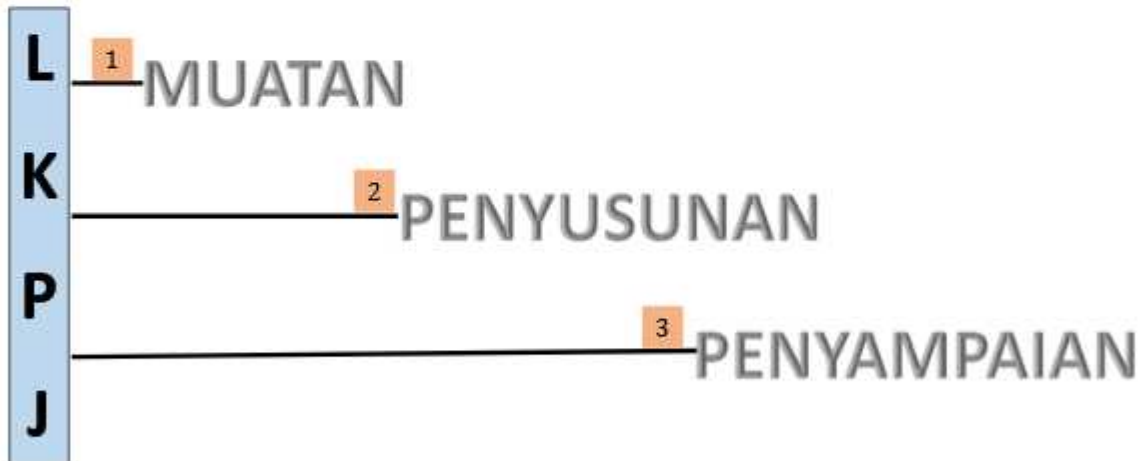
**Sistematika Permendagri Nomor 18 Tahun 2020  
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang  
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

BAB I	:	KETENTUAN UMUM
BAB II	:	PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 2 sd Pasal 13 (Pengukuran Capaian Kinerja melalui Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pelaksanaan TP dari Pusat dan Provinsi, Tahapan Penyusunan sesuai format dan penyampaianya)
BAB III	:	<b>PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN)</b> Pasal 14 sd Pasal 20 (Ruang lingkup Pengukuran Capaian Kinerja melalui Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pelaksanaan TP dari Pusat dan Provinsi, Penyusunan sesuai format dan Penyampaianya)
BAB IV	:	PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB V	:	TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VI	:	JENIS PENGHARGAAN
BAB VII	:	SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH)
BAB VIII	:	PENDANAAN
BAB IX	:	KETENTUAN LAIN-LAIN

## Permendagri No. 18 Tahun 2020

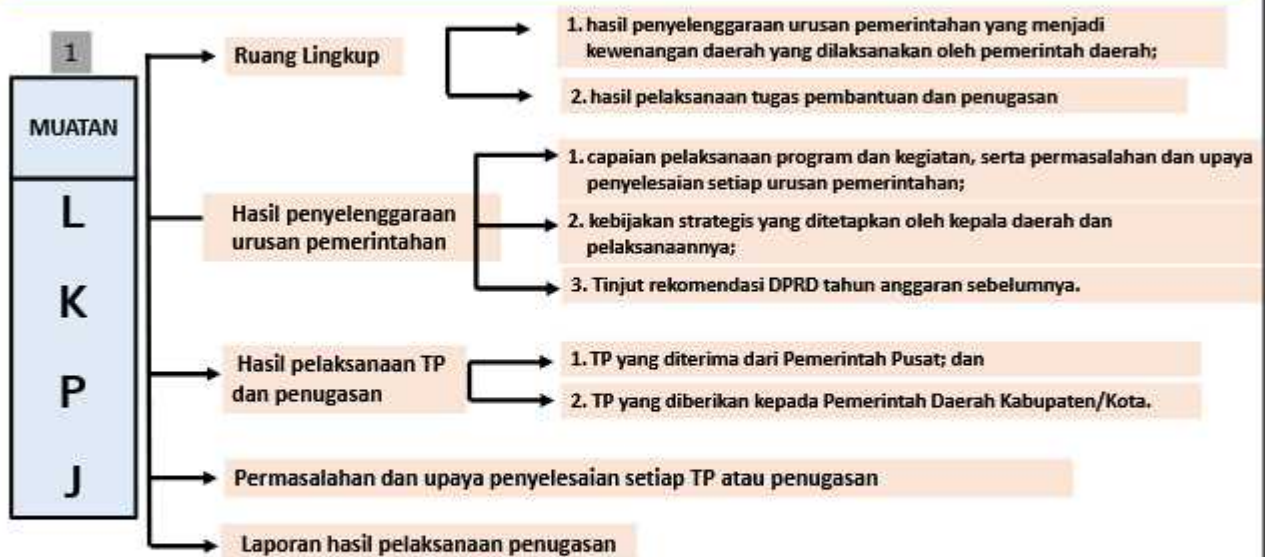
- Pasal 19 ayat (4): Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.**
- Pasal 19 ayat (5): Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.**

**BAB III**  
**PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
 Pasal 14 sd Pasal 20

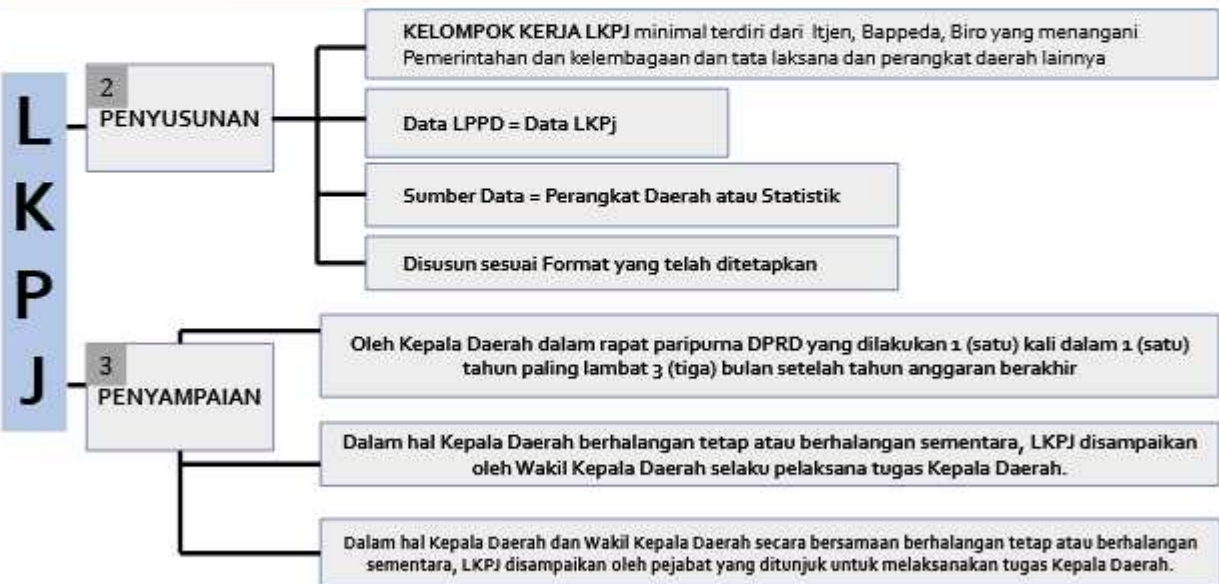


**BAB III**  
 Permendagri 18/2020

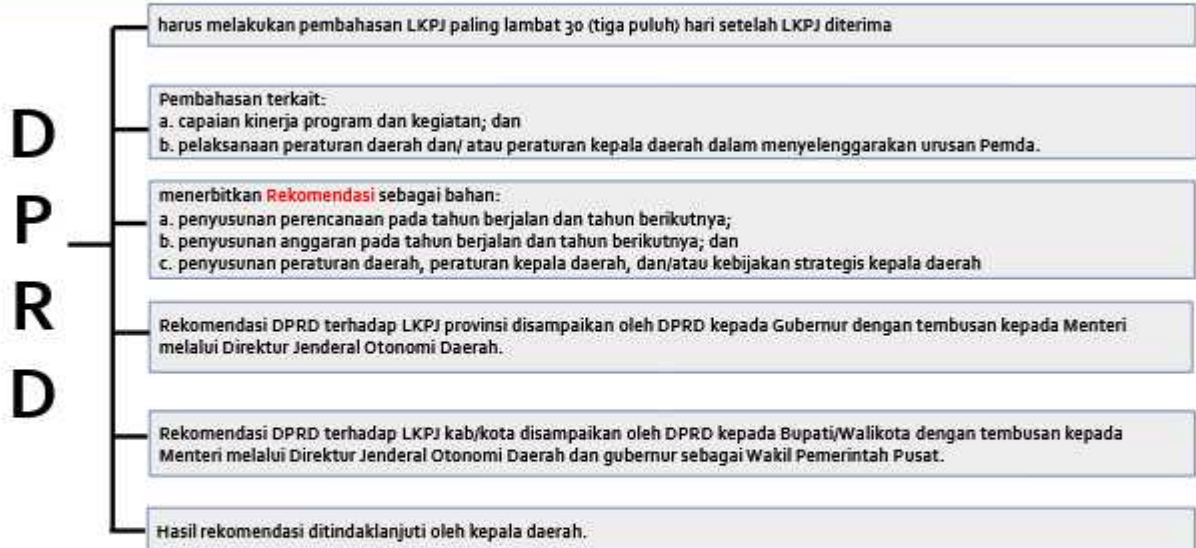
**PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN**  
**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**



### PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN



### PERAN DPRD DALAM LKPJ KEPALA DAERAH



Permendagri 18/2020

## MEMORI SERAH TERIMA JABATAN

- 1) Dalam hal Kepala Daerah atau Pejabat Pengganti berakhir masa jabatannya sebelum tahun anggaran berakhir, Kepala Daerah atau Pejabat Pengganti yang bersangkutan menyampaikan **Memori Serah Terima Jabatan** kepada Kepala Daerah yang baru atau Pejabat Pengganti.
- 2) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan LKPJ oleh Kepala Daerah yang baru atau Pejabat Pengganti.
- 3) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani dan diserahkan oleh Kepala Daerah yang baru atau Pejabat Pengganti.

## PENDANAAN

- 1) Pendanaan penyusunan dan penyampaian LPPD, LKPJ, RLPPD dan EPPD provinsi bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- 2) Pendanaan penyusunan dan penyampaian LPPD, LKPJ dan RLPPD kabupaten/kota bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

## Permasalahan terkait Penyusunan LKPJ

## Permasalahan terkait Penyusunan LKPJ



Tidak ada format baku laporan dari Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan LKPJ.)



Ketersediaan data/informasi yang tidak tepat waktu baik dari Perangkat Daerah dalam maupun dukungan data dari instansi vertikal yang berwenang mengeluarkan data resmi pemerintah.



Realisasi pencapaian target Program dan kegiatan Perangkat Daerah tidak sesuai Perencanaan dan pentingnya menyampaikan permasalahan dan solusinya



Kesesuaian capaian kinerja berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan RPJM Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah.



Perlu nya peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap penyampaian LKPJ Kab/Kota yang tepat waktu.

**TERIMA KASIH**

**PENDALAMAN TUGAS  
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA**

---



**Materi :**

**Strategi Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah  
yang Efektif dan Tepat Sasaran**

**Oleh :**

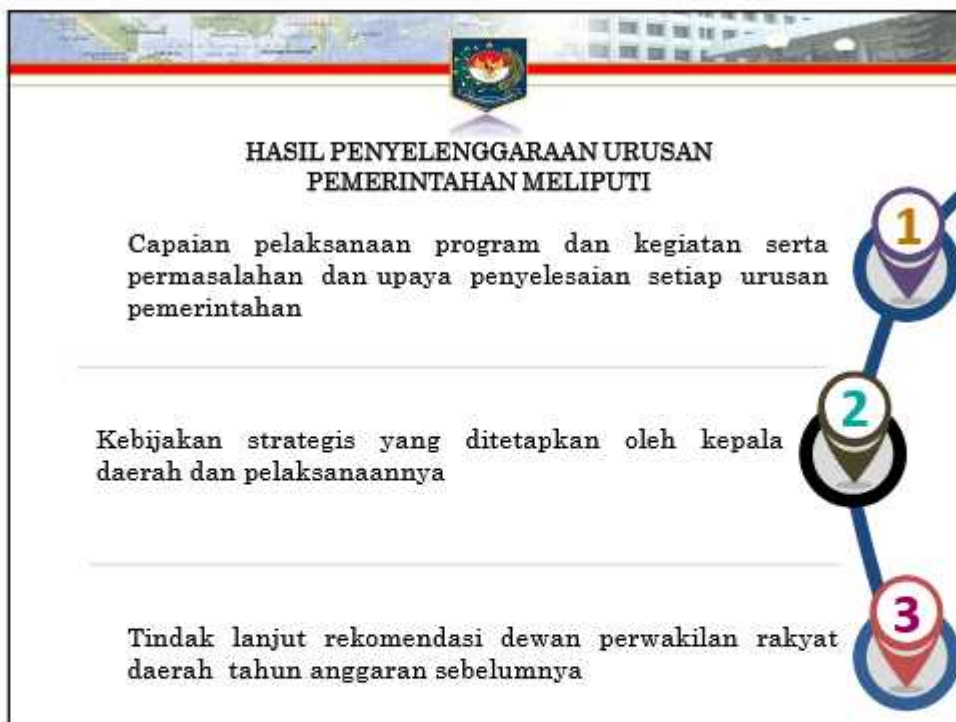
**Vivin Gunawan, S.STP., MA., Ak., CA**  
(Analisis Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri)

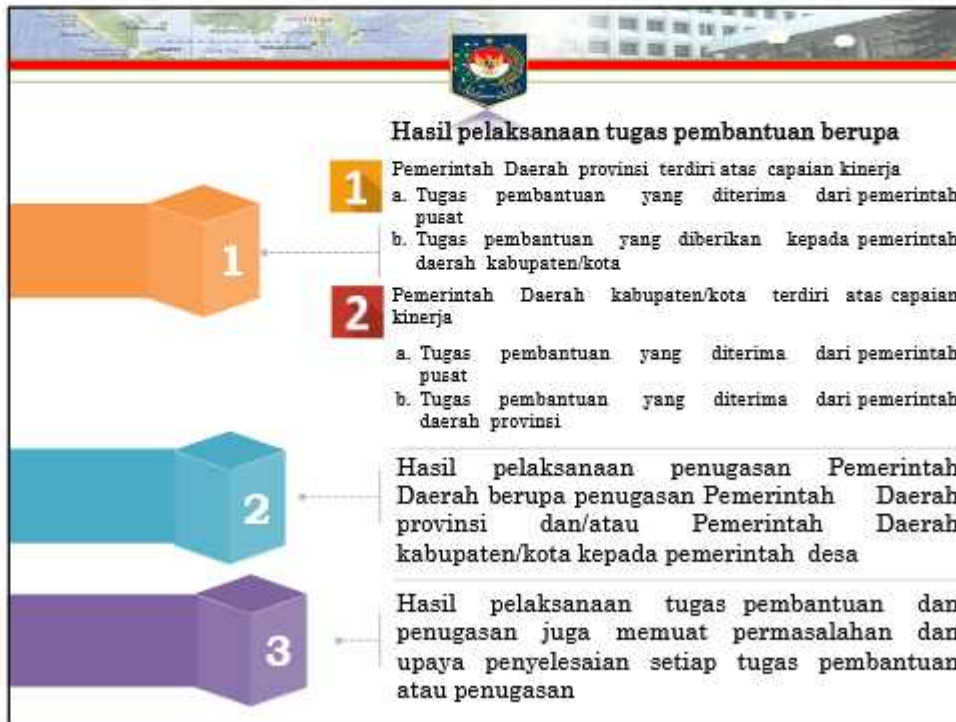
**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)**

**U N I V E R S I T A S A K I  
S E M A R A N G  
2 0 2 6**











## Pasal 19

**Ayat 1**

- Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir

**Ayat 2**

- Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat panpurna

**Ayat 3**

- Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna





## LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

**PP NO. 3 TH 2007**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun atau akhir masa jabatan.

**DIGANTI**

**PP NO. 13 TH 2019**

laporan yang disampaikan oleh Pemda kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemda selama 1 (satu) tahun anggaran

**TIDAK ADA LAGI LKPJ AKHIR MASA JABATAN**



## RUANG LINGKUP LKPJ

a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

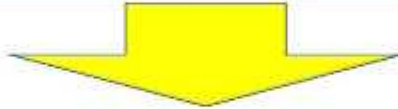
1. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
2. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
3. tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.

b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
2. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.



## **PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LKPJ**



### **Pasal 18**

- (1) Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.**
- (2) LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.**



### **Pasal 19**

- (1) Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurnayang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.**
- (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna.**
- (3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna.**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 20**

**Ayat 1**

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan

1. Capaian kinerja program dan kegiatan
2. Pelaksanaan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah

**Ayat 2**

Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam

1. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya
2. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya
3. Penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LKPJ diatur dalam Peraturan Menteri





**PENDALAMAN TUGAS  
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA**

---



**Materi :**

**Character Building : Menjadi Anggota DPRD yang Profesional,  
Berintegritas dan Berjiwa Kepemimpinan**

**Oleh :**

**Eko Suseno Hendro Riyadi Matruty, S.E., M.M., PFC.  
(SMARTSIA Training & Consultan)**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)**

**U N I V E R S I T A S A K I  
S E M A R A N G  
2 0 2 6**



**Berawal dari Masing-Masing Individu**

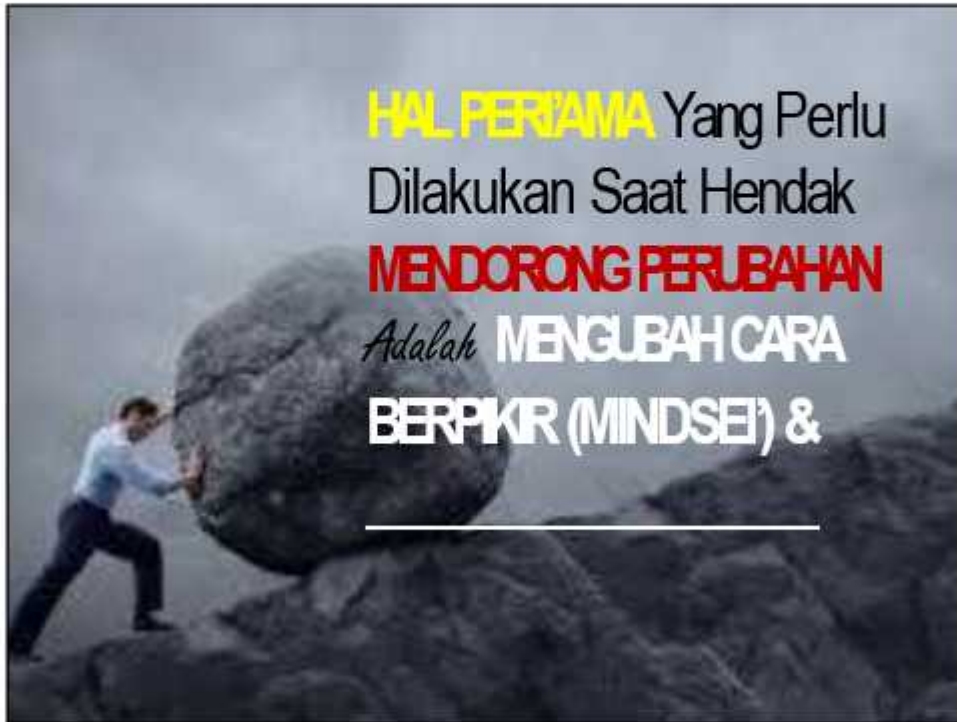
Pertama, \_\_\_\_\_



**Kemudian Baru Lembaga/Institusi**

**Perubahan HARUS dimulai dari masing-masing  
\_\_\_\_\_ dan kemudian akan BERDAMPAK terhadap  
LEMBAGA/ INSTITUSI**





**HAL PERJANA** Yang Perlu  
Dilakukan Saat Hendak  
**MENDORONG PERUBAHAN**  
*Adalah* **MENGUBAH CARA**  
**BERPIKR (MINDSET) &**



## Hakikat Kepemimpinan

suatu **seni** (*art*) dan **ilmu** (*science*)  
untuk \_\_\_\_\_  
orang lain, atau orang-orang yang  
dipimpin sehingga dari orang-  
orang yang dipimpinnya timbul  
suatu **KEMAUAN, RESPECT,**  
**KEPATUHAN** dan  
**KEPERCAYAAN** terhadap  
pemimpin untuk melaksanakan  
apa yang dikehendaki oleh  
pemimpin, atau tugas-tugas dan  
tujuan organisasi,  
secara efektif dan efisien

## Memaknai Profesional

Profesional merujuk pada seseorang yang menjalankan profesinya dengan keahlian tinggi ( ) dan berpegang teguh pada nilai moral tertentu ( ).

Memiliki sikap tanggung jawab, \_\_\_\_\_, dan objektivitas dalam menjalankan tugas tanpa membiarkan perasaan pribadi mengganggu hasil kerja.

Memiliki \_\_\_\_\_, keahlian, dan keterampilan yang terukur di bidangnya



## Integritas

Bertindak secara **konsisten** antara apa yang \_\_\_\_\_ dengan \_\_\_\_\_ sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi – nilai Spiritual)

(kamus kompetensi perilaku KPK)



- **NEGRIAS** adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip.
- Dalam etika, integritas diartikan sebagai \_\_\_\_\_ dari tindakan seseorang.
- lawan dari integritas adalah hipocrisy (hipokrit atau munafik).

## 5 Pekerti Integritas





**Love Your Job**  
**Create the Attitude**  
**That Makes It Possible**  
**To Achieve**

---



*Terima Kasih*



**PENDALAMAN TUGAS  
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA**

---



**Materi :**

**Focus Group Discussion (FGD)**

**Oleh :**

**Tim Universitas AKI**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)**

**UNIVERSITAS AKI  
SEMARANG  
2026**

# Focus Group Discussion (FGD)

## “Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel ”

---

### A. Pendahuluan

#### 1. Umum

Berikut adalah laporan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) “Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel” yang dilaksanakan di Hotel “Grand Karlita” Purwokerto - Banyumas.

#### 2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kualitas Anggota DPRD serta perangkat pendukungnya dalam melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah secara komprehensif, objektif, dan berbasis regulasi, sehingga hasil pembahasan LKPJ dapat menjadi instrumen pengawasan yang efektif dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja pembangunan daerah.

#### 3. Ruang Lingkup

Kegiatan ini merupakan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Purbalingga yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, yang dilaksanakan tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel “Grand Karlita” Purwokerto - Banyumas yang dihadiri oleh 49 peserta terdiri dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

# Focus Group Discussion (FGD)

“Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel ”

---

## B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan berupa Pendalaman Tugas/Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

## C. Hasil yang Dicapai

Focus Group Discussion (FGD) ini menggunakan metode ceramah diikuti diskusi interaktif antara pimpinan dan peserta dan dipandu oleh moderator Sdri. Annisa Fathatil Hidayah A., S.Sos.

Adapun hasil dari Focus Group Discussion (FGD) adalah sebagai berikut :

1. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama : 1 (satu) tahun anggaran; atau Akhir masa jabatan Kepala Daerah.

  - a. Mekanisme Pembahasan LKPJ di DPRD
    - Penyampaian

Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
    - Pembahasan

Dibahas oleh DPRD melalui : Pansus (Panitia Khusus), atau Komisi sesuai pembedangan
    - Pendalaman Materi
      - Evaluasi capaian indikator kinerja
      - Konsistensi RKPD – APBD – Realisasi
      - Analisis serapan anggaran, Evaluasi program prioritas
      - Analisis temuan BPK (jika relevan)
      - Evaluasi tindak lanjut rekomendasi sebelumnya

# Focus Group Discussion (FGD)

“Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel ”

---

## b. Prinsip Pembahasan LKPJ

- Objektif dan berbasis data
- Tidak politis
- Fokus pada kinerja, bukan personal
- Mengedepankan kepentingan masyarakat
- Berorientasi pada perbaikan tata kelola

## c. Keterkaitan LKPJ dengan Dokumen Perencanaan

LKPJ harus dianalisis dengan membandingkan :

RPJMD → RKPD → APBD → Realisasi → LKPJ → Rekomendasi DPRD →

Perbaikan RKPD berikutnya

\*Jika tidak sinkron, DPRD perlu memberikan catatan korektif

## d. Tantangan dalam Pembahasan LKPJ

- Data tidak lengkap atau tidak konsisten
- Indikator kinerja tidak terukur
- Serapan anggaran rendah
- Program tidak berdampak langsung
- Tindak lanjut rekomendasi sebelumnya belum optimal

## e. Strategi Optimalisasi Pembahasan LKPJ

- Membentuk Pansus yang kompeten
- Melibatkan tenaga ahli
- Menggunakan pendekatan berbasis indikator kinerja
- Membandingkan dengan target RPJMD
- Sinkronisasi dengan LHP BPK
- Fokus pada outcome, bukan hanya output

# Focus Group Discussion (FGD)

## “Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel ”

---

Pembahasan LKPJ merupakan instrumen strategis DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Rekomendasi DPRD harus menjadi alat perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dan dasar penyempurnaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

### 2. Strategi Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah yang Efektif dan Tepat Sasaran

LKPJ Kepala Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan kepada DPRD. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD wajib membahas dan memberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Rekomendasi DPRD tidak boleh bersifat normatif dan umum, melainkan harus spesifik, terukur, realistis, dan dapat ditindaklanjuti (actionable).

#### a. Prinsip Penyusunan Rekomendasi DPRD

Agar efektif dan tepat sasaran, rekomendasi harus memenuhi prinsip:

- **Berbasis Data dan Fakta**
  - Mengacu pada capaian indikator kinerja (IKU, IKK, SPM)
  - Membandingkan target dan realisasi
  - Menggunakan data LHP BPK, hasil pengawasan DPRD, dan aspirasi masyarakat
- **Fokus pada Permasalahan Strategis**
  - Prioritas pada urusan wajib pelayanan dasar
  - Program prioritas RPJMD dan RKPD
  - Permasalahan yang berdampak langsung pada masyarakat
  - Spesifik dan Terukur
  - Menyebutkan OPD terkait

# Focus Group Discussion (FGD)

“Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel ”

---

- Menyebutkan indikator kinerja yang harus diperbaiki
- Memiliki batas waktu tindak lanjut
- Selaras dengan Dokumen Perencanaan
  - RPJMD
  - RKPD
  - KUA-PPAS dan APBD tahun berikutnya
- b. Tahapan Strategis Penyusunan Rekomendasi
  - Analisis Dokumen LKPJ Secara Komprehensif
    - Analisis capaian kinerja program dan kegiatan
    - Identifikasi deviasi target dan realisasi
    - Evaluasi serapan anggaran dan output/outcome
  - Sinkronisasi dengan Dokumen Pendukung
    - RPJMD dan RKPD
    - Renstra dan Renja OPD
    - LHP BPK
    - Hasil Reses dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
  - Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah

Gunakan pendekatan:

    - Analisis gap (target vs realisasi)
    - Analisis sebab-akibat (problem tree analysis)
    - Evaluasi efektivitas anggaran
  - Perumusan Rekomendasi

Gunakan rumus sederhana:

Masalah → Penyebab → Dampak → Solusi/Rekomendasi → Target

Perbaikan

# Focus Group Discussion (FGD)

“Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel ”

---

- Penetapan Prioritas Rekomendasi

Kelompokkan :

- Prioritas Tinggi (berdampak luas dan mendesak)
- Prioritas Menengah
- Prioritas Jangka Panjang

c. Strategi Agar Rekomendasi Tidak Sekadar Formalitas

- Mengintegrasikan rekomendasi ke dalam:
  - RKPD Tahun berikutnya
  - KUA-PPAS
  - Pembahasan APBD
- Membentuk Tim Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi
- Meminta laporan berkala dari Kepala Daerah
- Menggunakan rekomendasi sebagai dasar pengawasan triwulanan

Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk :

- a) Meningkatkan akuntabilitas kepala daerah
- b) Memperbaiki kualitas pelayanan publik
- c) Menjamin efektivitas penggunaan APBD
- d) Mendorong tercapainya target RPJMD

Rekomendasi yang efektif adalah rekomendasi yang tajam secara analisis, jelas arah perbaikannya, dan konsisten dikawal tindak lanjutnya.

3. Character Building: Menjadi Anggota DPRD yang Profesional, Berintegritas, dan Berjiwa Kepemimpinan

Anggota DPRD memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks menuntut anggota DPRD tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memiliki karakter

# Focus Group Discussion (FGD)

## “Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel ”

---

kuat, integritas tinggi, serta jiwa kepemimpinan yang visioner dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Character building menjadi fondasi penting dalam membentuk pribadi wakil rakyat yang profesional, beretika, dan mampu menjadi teladan di tengah masyarakat.

### a. Nilai-Nilai Dasar Character Building DPRD

- Profesionalisme
  - Memahami peraturan perundang-undangan secara komprehensif.
  - Mampu menganalisis dokumen perencanaan dan penganggaran (RPJMD, RKPD, APBD).
  - Disiplin dalam kehadiran, pembahasan, dan pengambilan keputusan.
  - Berbasis data dan fakta dalam setiap kebijakan.
- Integritas
  - Konsisten antara ucapan dan tindakan.
  - Menolak gratifikasi dan konflik kepentingan.
  - Transparan dan akuntabel.
  - Menjaga etika dan marwah lembaga DPRD.
- Kepemimpinan
  - Visioner dan memiliki arah kebijakan yang jelas.
  - Mampu membangun komunikasi lintas fraksi dan OPD.
  - Responsif terhadap aspirasi masyarakat.
  - Mampu mengambil keputusan yang berani dan tepat.

### b. Kompetensi yang Harus Dimiliki Anggota DPRD

- Kompetensi Substantif
  - Pemahaman regulasi pemerintahan daerah.
  - Kemampuan membaca laporan keuangan dan LKPJ.
  - Analisis kebijakan publik.

# Focus Group Discussion (FGD)

## “Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel ”

---

- Kompetensi Sosial
    - Komunikasi politik yang efektif.
    - Manajemen konflik.
    - Kolaborasi dan negosiasi.
  - Kompetensi Personal
    - Kecerdasan emosional.
    - Manajemen waktu.
    - Ketahanan moral dan mental.
- c. Indikator Anggota DPRD yang Profesional dan Berintegritas
- Tidak terlibat kasus hukum.
  - Aktif dalam pembahasan dan pengawasan.
  - Konsisten memperjuangkan aspirasi konstituen.
  - Menjadi figur yang dipercaya masyarakat.

Menjadi anggota DPRD bukan sekadar jabatan politik, melainkan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan profesionalisme, integritas, dan kepemimpinan yang kuat. Character building bukan proses sesaat, melainkan pembentukan sikap dan nilai yang harus terus diasah melalui pendidikan, pengalaman, dan komitmen moral.

### D. Penutup

Optimalisasi pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan bagian penting dalam memperkuat fungsi pengawasan DPRD serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Melalui pembahasan LKPJ yang sistematis, objektif, dan berbasis data, DPRD tidak hanya menjalankan fungsi kontrol, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis yang konstruktif bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah di tahun berikutnya.

## Focus Group Discussion (FGD)

### “Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel ”

---

Sinergi yang kuat antara DPRD dan pemerintah daerah, didukung dengan pemahaman regulasi yang komprehensif serta analisis capaian kinerja yang terukur, akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Rekomendasi DPRD atas LKPJ hendaknya menjadi instrumen perbaikan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan perencanaan dan penganggaran daerah.

Dengan demikian, optimalisasi pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum strategis untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan publik. Komitmen bersama terhadap transparansi dan akuntabilitas akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, responsif, dan berintegritas.



# **FOTOCOPY SERTIFIKAT**



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/1251/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 001/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., M.M.**  
Jabatan : Ketua DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karilita Puncokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026  
Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/1252/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 002/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karilita Puncokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026  
Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/1253/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 003/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **ARIS WIDIARSO, S.H.**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karilita Puncokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026

Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/1254/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 004/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026  
Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1255/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 005/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **IMAWAN TAQIUDIN**  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Puncokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026  
Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1256/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 006/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **KARSENO, S.H., M.M.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Kariita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026

Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1257/BPSPDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 007/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **H. TONGAT, S.H., M.M.**  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026  
Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1258/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 008/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **ERNI WIDYAWATI, S.Sos.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Puncokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026

Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1259/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 009/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **WURIYATI, A.Md.**  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026  
Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1260/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 010/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **BAYU WIDYATAMA**  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026  
Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1261/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 011/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **USWATUN KHASANAH**  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026  
Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1262/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 012/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **ANDHIKA WISNU MOYO**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Kariita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026

Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1263/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 013/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H.**  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026  
Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1264/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 014/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **NURANI DIAH PERMATASARI**  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Puncokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026  
Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1265/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 015/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **AGUS PRIYANTO**  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026  
Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1266/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 016/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **H. KATNO, S.T.**  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Kariita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026  
Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1267/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 017/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **Drs. LUKMANUDIN**  
Jabatan : **Anggota DPRD**  
Instansi : **DPRD Kabupaten Purbalingga**

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Kariita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026  
Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1268/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 018/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **MISWANTO, M.Pd.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026

Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1269/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 019/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **H. HAMID, S.H.**  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026  
Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSPDM : 893.3.33/1270/BPSPDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 020/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **PUPUT ADI PURNOMO**  
Jabatan : **Anggota DPRD**  
Instansi : **DPRD Kabupaten Purbalingga**

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026  
Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1271/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 021/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **SABILA RIZKI FEBRIANA, A.Md., Kes**  
Jabatan : **Anggota DPRD**  
Instansi : **DPRD Kabupaten Purbalingga**

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026  
Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1272/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 022/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H.**  
Jabatan : **Anggota DPRD**  
Instansi : **DPRD Kabupaten Purbalingga**

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026  
Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1273/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 023/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **Hj. ERLIYATI, S.E.**

Jabatan : **Anggota DPRD**

Instansi : **DPRD Kabupaten Purbalingga**

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026

Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1274/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 024/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **H. SAHLAN**  
Jabatan : **Anggota DPRD**  
Instansi : **DPRD Kabupaten Purbalingga**

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karilita Puncokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026  
Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1275/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 025/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **CAHYO SUJILLO, A.Md., RO**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026  
Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSPDM : 893.3.33/1276/BPSPDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 026/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **SUMARSIH, S.IP., M.Pd.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Kariita Puncokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026

Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1277/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 027/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **SITI SIFA, S.Pd.**  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026  
Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1278/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 028/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **NIKEN HINDRIANINGSIH**  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026  
Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1279/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 029/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **PADANG KUSUMO, S.H.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Kariita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026

Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSPDM : 893.3.33/1280/BPSPDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 030/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **DIDIK SUPRAYOGI, A.Md**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026

Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1281/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 031/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **H. AKHMAD SA'BANI, S.E.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026

Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1282/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 032/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **TEGUH DWIYANTO, S.T.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Puncokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026

Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1283/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 033/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **ADI SUPRIYANTO, S.H.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026

Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1284/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 034/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **UUT TRIAS YANUAR**  
Jabatan : **Anggota DPRD**  
Instansi : **DPRD Kabupaten Purbalingga**

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Kariita Puncokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026  
Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1285/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 035/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **IDRUS ANJASMORO, A.Md**

Jabatan : **Anggota DPRD**

Instansi : **DPRD Kabupaten Purbalingga**

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026

Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1286/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 036/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **H. ADI YUWONO, S.H.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Puncokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026

Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1287/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 037/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **Hj. YUNJARTI, S.H.**  
Jabatan : **Anggota DPRD**  
Instansi : **DPRD Kabupaten Purbalingga**

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026  
Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1288/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 038/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **MUGI WAHYUDI, S.AP**  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Kariita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026  
Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1289/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 039/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **BAMBANG SUPRIYANTO, S.H.**  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Kariita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026  
Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1290/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 040/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **FIARDHA ANGGAR KUSUMA, S.K.M.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Puncokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026

Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1291/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 041/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **SARJONO, S.Pd., M.Si.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026

Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1292/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 042/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **Drs. H. MUGO WALUYO**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Kariita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026

Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1293/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 043/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **SUHARTO, S.H.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Kariita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026

Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1294/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 044/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **MUSOFAN, S.Si.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Puncokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026

Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1295/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 045/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **H. IN'AM BIROHMATILLAH**  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026  
Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1296/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 046/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **LIA MAHFUROH, A.Md.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026

Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1297/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 047/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **SUNARKO, S.H.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026

Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSPDM : 893.3.33/1298/BPSPDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 048/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **PREDI SETIAJI, S.H.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026

Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1299/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 049/SF/BTK/REK-UNAKI/II/2026

Diberikan kepada :

Nama : **H. KHODIRIN, S.H.**

Jabatan : **Anggota DPRD**

Instansi : **DPRD Kabupaten Purbalingga**

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema "**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Puncokerto - Banyumas.

Semarang, 07 Februari 2026

Rektor,



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027 101

# DAFTAR MATERI PENDALAMAN TUGAS

NOMOR	MATERI PENDALAMAN TUGAS	JAM PELAJARAN
1.	PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH	5
2.	STRATEGI PENYUSUNAN REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ KEPALA DAERAH YANG EFEKTIF DAN TEPAT SASARAN	5
3.	<i>CHARACTER BUILDING</i> : MENJADI ANGGOTA DPRD YANG PROFESIONAL, BERINTEGRITAS DAN BERJIWA KEPEMIMPINAN	5
4.	FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)	5

Semarang, 07 Februari 2026

Kepala  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas AKI



**ANA WAHYUNI, S.Si., M.Kom.**  
NIDN. 0601067503



# **DOKUMENTASI**



## BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026





## BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026





## BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel!"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026





## BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026





## BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026





## BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka  
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel!"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026





## BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel!"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026





## BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel!"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026





## BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel!"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026





## BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

**"Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel!"**

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026





## BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

**"Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka  
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel!"**

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026





## BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026





## BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026





## BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026





## BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel!"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026





## BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026





## BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

**"Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel!"**

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026





## BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026

